

Sang Pemburu dalam Jerat Kerja Upahan: Investigasi Moda Produksi dalam Proses Industrialisasi Sagu di Papua Barat

Fuad Abdulgani

Pengajar di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

✉ fuad.abdulgani87@gmail.com

Abstrak Tulisan ini menganalisis bagaimana orang Kais, salah satu komunitas pemburu-peramu di wilayah hutan sagu alami Papua Barat, menghadapi dan melibatkan diri dalam proses industrialisasi pertanian. Pengorganisasian tenaga kerja orang Kais ke dalam proses produksi kapitalis dimungkinkan oleh eksistensi dominasi politik laki-laki terhadap akses dan penguasaan sumberdaya kolektif (klan), sehingga menempatkan mereka sebagai kelompok yang menentukan dalam merespons kepentingan industri atas kebutuhan bahan baku mentah (pohon sagu) serta tenaga kerja sebagai prasyarat bekerjanya operasi industrial. Meluasnya peran pasar sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup telah membawa orang Kais ke dalam proses komodifikasi subsistensi yang pada gilirannya mendesak mereka untuk lebih intensif terlibat di dalam relasi kerja upahan pada aktivitas produksi kapitalis (komodifikasi tenaga kerja), terutama bagi golongan laki-laki muda, sekalipun secara *de facto* orang Kais tidak terlebih dahulu mengalami proses akumulasi primitif. Proses interaksi antar-dua moda produksi, yakni moda kapitalis dan moda produksi berlandaskan kekerabatan, serta konsekuensinya terhadap lingkungan dan ikatan-ikatan sosial penduduk setempat yang ditemukan, pada gilirannya meragukan pendekatan industrial dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Papua; semenjak komunitas-komunitas pemburu-peramu yang sara diri ditransformasi menjadi tenaga kerja murah tanpa memiliki kendali dalam proses dan hasil dari pembangunan itu sendiri.

KATA KUNCI: moda produksi, komodifikasi subsistensi, komodifikasi tenaga kerja, proses kerja, industrialisasi

Pengantar

Sejak rezim Orde Baru hingga era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan pembangunan kapitalistis yang mengedepankan industri di Papua. Dalam sejarah pembangunan di Indonesia, tanah Papua tercatat sebagai lokasi pertama tempat beroperasinya perusahaan asing pertama, PT Freeport McMoran, yang memperoleh izin lokasi tambang setelah rilisnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Selain pertambangan, sektor minyak bumi, kehutanan, dan perikanan menjadi ruang bagi eksploitasi alam Papua oleh perusahaan-perusahaan domestik dan asing, sampai hari ini (Resosudarmo *et al.* 2015). Selain industri yang bercorak ekstraktif, praktik industri tersebut juga diiringi dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Budiarjo dan Liong 1988).

Setelah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan pemekaran Papua menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat pada 2003, skema pembangunan baru untuk Papua diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui rancangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menempatkan Papua sebagai lumbung pangan nasional bahkan internasional (Ito, Rachman, dan Savitri 2014). Melalui rancangan MP3EI, terbukalah jalan bagi proyek raksasa seperti *Merauke Integrated Food Estate and Energy* (MIFEE) yang realisasinya telah merampas tanah dan hutan penduduk asli untuk industri pangan dan bioenergi (Savitri 2013). Di masa pemerintahan Joko Widodo, menggunakan retorika “membangun Indonesia dari pinggir”, pemerintah menggalakan pembangunan infrastruktur besar-besaran di Papua guna menopang proses industrialisasi.

Sebagaimana diamati oleh Resosudarmo *et al.* (2015), corak pembangunan di Papua pasca-kebijakan otonomi daerah cenderung bertahan dalam pola ekstraktif. Industri ekstraktif memiliki kecenderungan negatif manakala pertumbuhannya hanya menguntungkan penduduk di kota-kota besar pusat industri tersebut, seperti Sorong dan Mimika, serta kota-kota pusat pemerintahan. Mereka mencatat bahwa pembangunan sektor pertanian perlu dilakukan guna memberi keuntungan lebih signifikan bagi populasi di pedesaan Papua (Resosudarmo *et al.* 2015).

Salah satu upaya yang dapat kita amati sebagai usaha pembangunan sektor pertanian di Papua yakni industrialisasi sagu. Indonesia memiliki hutan sagu seluas hampir 1,4 juta hektare, dengan

1,2 juta hektare berupa ‘hutan sagu alami’ dan sisanya 148.000 hektare sebagai ‘hutan sagu budidaya’. Wilayah hutan sagu terluas terdapat di Pulau Papua dengan luasan sekitar 1,2 juta hektare; sebagian besar merupakan hutan sagu alami yang terhampar di lahan gambut (Mubekti 2013: 96). Di Provinsi Papua Barat terdapat potensi hutan sagu seluas 981.316 hektare, sementara di Provinsi Papua potensinya mencapai 400.480 hektare¹.

Dengan potensi yang demikian besar, tidak mengherankan apabila pemerintah Indonesia kemudian melirik sagu di Papua sebagai potensi bahan pangan yang dapat dikembangkan. Pada 2012, pemerintah Indonesia memberi mandat kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun industri sagu di Provinsi Papua Barat. Dahlan Iskan, Menteri BUMN saat itu, kemudian menugaskan Perum Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) sebagai pelaksana pembangunan industri sagu nasional (Sutianto 2015). Setelah beberapa tahun proses persiapan, akhirnya pada Januari 2016, presiden yang baru, Joko Widodo (Jokowi), meresmikan pembangunan pabrik sagu Perhutani yang berlokasi di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat (*Duta Rimba* Januari–Februari 2016: 59–63).

Sebagai pemegang mandat pemerintah, Perhutani memperoleh konsesi lahan seluas 16.000 hektare di kawasan hutan sagu alami di Sorong Selatan. Akan tetapi, kawasan hutan sagu alami itu secara *de facto* bukanlah kawasan yang bebas dari penduduk setempat. Kawasan hutan tersebut merupakan ruang hidup suku-bangsa yang dikenal sebagai suku Imekko (Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda) yang terdiri atas beberapa klan dan hidup tersebar di kampung-kampung dalam kawasan hutan. Komunitas-komunitas ini menjalani cara hidup berburu, meramu, dan mengolah sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumberdaya alam hutan dan sungai. Salah satu subsuku tersebut adalah orang Kais² yang ruang hidupnya persis berada di wilayah konsesi Perhutani.

Tulisan ini hendak mengetahui hubungan antara orang Kais dengan proses industrialisasi yang berlangsung sejak Perhutani beroperasi di kawasan hutan sagu alami tempat mereka hidup. Saya ingin mengetahui bagaimana orang Kais terlibat dalam proses industrialisasi dan bagaimana mereka mengalami konsekuensi-konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari keterlibatannya dalam proses itu. Di kawasan hutan sagu alami Sorong Selatan, Perhutani bukanlah perusahaan pertama yang mencoba mengembangkan produksi tepung sagu modern dalam skala besar. Sejak 2007, perusahaan milik grup Austindo Nusantara Jaya (ANJ), yakni PT ANJ Agri Papua (ANJAP) dan PT ANJ-Agri, telah memegang konsesi la-

1. Data disampaikan oleh Dr. Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam materi presentasi berjudul “Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Sagu Pada Kawasan Hutan Produksi”, Bogor, 9–10 November 2016.

2. Orang Kais termasuk ke dalam kelompok bahasa Trans Nugini (lihat Hidayah 2015: 152).

han seluas 40.000 hektare di kawasan hutan Sorong Selatan yang dihuni oleh orang Iwaro. ANJ telah membangun pabrik sagu modern yang pertama di kawasan tersebut. Dampak dari keberadaan industri sagu di Sorong Selatan telah dikaji oleh Mecky Sagrim (2016) yang secara khusus menyoroti soal perubahan hubungan tenurial pada klan-klan yang tanah ulayatnya tercaplok ke dalam konsesi ANJ dan Perhutani. Berbeda dengan penelitian Sagrim, penelitian ini terbatas untuk mengkaji interaksi antara orang Kais dengan proses industrialisasi sagu yang dijalankan Perhutani.

Analisis yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari informasi yang dikumpulkan melalui kerja lapangan selama lima bulan di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, selama Februari–Juni 2017.³ Saya menetap di Kais, mengunjungi kampung-kampung sekitar serta Ibu Kota Kabupaten Sorong Selatan, Kota Teminabuan, secara berkala. Selain melakukan penelitian, saya juga bekerja sebagai pengorganisir masyarakat di Kais. Dengan begitu, pengumpulan informasi dilakukan tidak hanya melalui pengamatan-terlibat dan wawancara dalam konteks penelitian, tetapi juga melalui diskusi kelompok dalam konteks pengorganisasian warga. Kajian pustaka dan pengumpulan bahan sekunder dilakukan untuk menambah wawasan konteks dan analisis tulisan ini. Dalam usaha memahami hubungan antara orang Kais, yang dipandang sebagai masyarakat prakapitalis, dengan proses pembangunan kapitalisme yang melibatkan mereka, saya terinspirasi dari diskusi tentang relasi antar-moda produksi yang dikembangkan Eric Wolf (1982) dalam karyanya *Europe and the People Without History* serta pendekatan ekonomi politik untuk memahami dinamika kelas dalam perubahan agraria dari Henry Bernstein (2010). Dengan kata lain, tulisan ini menggunakan kerangka kerja ekonomi-politik sebagai alat analisis.

Tulisan ini akan dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama akan menengahkan penggunaan konsep moda produksi dalam menelaah riwayat inkorporasi orang Kais ke dalam moda produksi kapitalis. Bagian berikutnya berisi deskripsi tentang orang Kais dan moda produksi mereka yang berlandaskan kekerabatan. Kemudian, saya mengulas bagaimana industri sagu diorganisasikan di wilayah konsesi yang mengambil tempat ruang hidup orang Kais. Setelah itu, relasi antara dua moda produksi dalam konteks tahap awal industrialisasi sagu dianalisis dengan memberi perhatian khusus pada proses kerja serta menunjukkan konsekuensi-konsekuensi dari relasi tersebut bagi orang Kais. Pada bagian penutup disajikan kesimpulan serta refleksi berkenaan dengan model pembangunan apa yang dapat dengan tepat mendudukkan orang Papua sebagai subjek pembangunan.

3. Saya juga memanfaatkan catatan lapangan yang ditulis oleh Carolina Astri yang melakukan kerja lapangan di lokasi yang sama pada Agustus–Oktober 2016. Atas kebaikannya berbagi data, saya berterima kasih.

Inkorporasi Orang Kais ke dalam Ekonomi Kapitalistis

Pada bagian ini kita akan melacak bagaimana orang Kais terinkorporasi ke dalam moda produksi kapitalis. Pengamatan atas proses sejarah ini dalam hubungannya dengan proses akumulasi kapital di Papua akan ditinjau melalui konsep moda produksinya Karl Marx sebagaimana dimanfaatkan oleh Eric Wolf (1982). Perlu digarisbawahi, Wolf tidak menempatkan konsep moda produksi dalam suatu kerangka evolusi kebudayaan secara unilinear atau sekadar klasifikasi tipe masyarakat, melainkan sebagai cara berpikir dalam memandang relasi-relasi strategis yang terbentuk dari pengalaman ekspansi Eropa terhadap populasi-populasi lain (yang disebut masyarakat “primitif”, tribal) guna melihat konsekuensi yang lebih jauh dari keterhubungan tersebut (Wolf 1982: 100). Kemudian, berbeda dengan eksponen aliran Marxian struktural seperti Maurice Godelier yang juga memanfaatkan konsep moda produksi dalam menganalisis relasi antar-moda produksi kapitalis dan prakapitalis, Wolf tidak memandang relasi di antara keduanya dalam pengertian kausalitas struktural. Ia sepakat dengan pendekatan sistem yang mekanistik dalam memperhatikan relasi-relasi antarelemen di dalam moda produksi, namun, menurut Wolf, pemahaman strukturalis memiliki keterbatasan manakala menempatkan orang-orang sebagai wahana semata dari sistem, yang dengan demikian menampilkan aspek agensi atau kemungkinan dari manusia untuk berkesadaran di dalam proses historis (Wolf 1982: 401).

Pengertian tentang moda produksi dilandasi oleh konsep ‘kerja’, ‘tenaga kerja’, dan ‘kerja sebagai proses sosial’. Perbedaan konsep kerja dan tenaga kerja merupakan salah satu sumbangsih kunci Marx dalam tradisi ekonomi-politik (Fine dan Saad-Filho 2010: 20). Kerja merupakan aktivitas individu sosial dalam upaya mentransformasi berbagai sumberdaya di alam untuk digunakan bagi kepentingan manusia. Sementara tenaga kerja merupakan segenap kemampuan fisik maupun kognitif yang dimiliki individu, yang menubuh pada individu tersebut (sebagai makhluk biologis), dalam usahanya mentransformasikan kekuatan di alam. Semenjak manusia terlahir dalam relasinya dengan manusia lain alias makhluk sosial, dan individu-individu yang ada selalu merupakan individu sosial, maka kerja sejatinya merupakan proses sosial. Kerja itu sendiri, beserta tata cara bagaimana tenaga kerja dikerahkan, dalam prosesnya sudah selalu bersifat sosial; di dalamnya terdapat serangkaian tata cara dalam hal mengorganisir hubungan antarorang dalam proses mentransformasi alam (hubungan manusia dengan alam). Marx memandang bahwa aktivitas produksi merupakan aspek paling

elementer di dalam kehidupan ekonomi manusia. Produksi itu sendiri merujuk pada rangkaian kompleks dari relasi-relasi yang mutual dan saling tergantung antara alam, kerja, tenaga kerja, dan organisasi sosial. Aktivitas produksi merupakan pengorganisasian secara sosial manusia dalam 1) usahanya mentransformasi alam, serta 2) mencipta dan mencipta ulang ikatan-ikatan sosial yang memengaruhi usaha transformasi alam tersebut. Dengan demikian, aktivitas produksi dapat bermakna keterlibatan manusia dengan alam serta reproduksi dari ikatan-ikatan sosial (Wolf 1982: 74–75).

Konsep kerja sebagai proses sosial memungkinkan kita untuk mengonseptualisasikan beragam cara yang dilakukan manusia dalam mengorganisir aktivitas produksi mereka. Cara-cara mengorganisir aktivitas produksi itu membentuk suatu moda produksi, yakni serangkaian relasi sosial yang muncul secara spesifik dan historis melalui mana tenaga kerja diorganisasikan untuk mentransformasi alam dengan perantaraan perkakas kerja, kemampuan, organisasi, dan pengetahuan. Buat Wolf (1982: 75–76), kegunaan konsep ini tidak terletak pada perkara pengklasifikasian, tetapi dalam kapasitasnya untuk menggarisbawahi relasi-relasi strategis di dalam perkembangan kerja sebagai proses sosial yang pada gilirannya mengorganisasikan keragaman manusia.

Analisis atas pertautan antar-moda produksi juga berguna dalam menjelaskan perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat. Bagi Wolf, perubahan budaya atau evolusi kebudayaan tidak terjadi di dalam masyarakat yang terisolir, namun selalu terjadi di dalam sistem yang saling berhubungan (*interconnections*) di mana tiap-tiap masyarakat yang berbeda-beda terhubung di dalam arena sosial yang lebih luas. Wolf membangun konstruksi moda produksi dalam konteks kepentingan untuk menganalisis ekspansi dampak dari moda produksi kapitalis di sepenjuru dunia di mana tenaga kerja sosial dialokasikan secara berbeda-beda. Konstruksi yang dibangun Wolf ini membantu dalam menunjukkan pertemuan moda produksi tersebut. Untuk tujuan tersebut, dia mendefinisikan tiga moda produksi: moda produksi kapitalis, moda produksi perupetian, dan moda produksi berlandaskan kekerabatan (Wolf 1982: 76). Konstruksi Wolf berperan dalam menunjukkan kesalingterhubungan di antara masyarakat yang berbeda-beda dalam proses historis, khususnya pada konteks perluasan moda kapitalis ke sepenjuru dunia. Lebih lanjut, kegunaan dari konsep moda produksi terletak pada kemampuannya untuk memberikan kita gambaran relasi-relasi intersistemis maupun intrasistemis. Ia menyarankan agar kita menggunakan konsep tersebut untuk mengungkap cara-cara di mana suatu moda, yakni kapitalisme, berinteraksi dengan moda-

moda produksi lain dalam rangka meraih dominasinya (Wolf 1982: 79). Perlu digarisbawahi pula bahwa hal utama yang mencirikan kapitalisme adalah pembelian dan penjualan kapasitas pekerja atas tenaga kerja mereka dan penggunaannya dalam produksi komoditas untuk tujuan meraup laba (Fine dan Saad-Filho 2010: 19–20). Hal inilah yang akan kita cermati dalam pertautan antar-moda produksi yang terjadi dalam konteks industrialisasi sagu, manakala operasi industrial dapat bekerja melalui curahan tenaga kerja komunitas setempat.

Analisis dalam artikel ini akan mengikuti cara bagaimana Wolf menggunakan konsep moda produksi seperti dipaparkan di atas. Dalam bagian ini saya mencoba untuk menelusuri seperti apa kesalingterhubungan orang Kais dengan masyarakat-masyarakat lain dalam arena sosial yang lebih luas pada tiap babak sejarah (Wolf 1982: 76). Analisis atas proses pengerahan tenaga kerja secara sosial dalam dimensi historis ini menunjukkan beberapa poin dalam hal:

- pentingnya untuk memperhatikan hubungan antara kuasa negara terhadap komunitas berlandaskan kekerabatan;
- pelibatan orang Kais dengan moda produksi kapitalis dimulai sejak pendudukan oleh pemerintah kolonial Belanda, namun betul-betul berjalan lancar semenjak fase pendudukan Papua oleh negara Indonesia, terutama semenjak rezim Orde Baru;
- kesalingterhubungan antara orang Kais dengan kekuatan politik negara Indonesia dan kapital perusahaan memperlihatkan bahwa bergantinya rezim pemerintahan menunjukkan bergantinya cara ekstraksi sumberdaya alam di ruang hidup orang Kais serta cara bagaimana tenaga kerja setempat dieksploitasi.

Rekonstruksi atas sejarah orang Kais dibangun berdasarkan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam sejarah lisan dan memori kolektif mereka. Terdapat sedikit petunjuk berdasarkan sejarah lisan orang Kais bahwa pada masa prakolonial tampaknya mereka terpaut di dalam relasi dengan moda produksi perupetian di bawah pengaruh kekuasaan kesultanan Tidore. Petunjuk ini dapat dijumpai dalam kisah “kedatangan Injil” di kampung Kais. Dikisahkan bahwa ketika Pendeta Wetstein datang ke kampung Kais pada 1916, saat itu telah ada “orang yang memakai songkok” alias muslim di antara penduduk Kais. Sang pendeta memberikan tawaran bahwa jika tongkat yang ia sodorkan patah ketika digenggam oleh pemimpin Kais, maka ia dan semua anggota komunitas akan masuk agama

Kristen (Protestan). Tongkat itu patah, dan sejak saat itulah orang Kais memasuki agama baru.

Cerita yang setiap tahun digaungkan dalam ritual kedatangan Injil di kampung Kais ini membuka pertanyaan ihwal bagaimana agama Islam telah memiliki pengikut di pedalaman pesisir kepala burung Papua. Jika merujuk pada catatan sejarahwan, keberadaan penganut Islam di wilayah Papua bagian barat merupakan bukti dari pengaruh kekuasaan kesultanan Tidore terhadap komunitas atau kerajaan-kerajaan kecil di kepulauan dan bagian pesisir kepala burung. Agama Islam dianut oleh para pemimpin dari berbagai kelompok yang beraliansi dengan Tidore sebagai tanda bukti atas loyalitas mereka terhadap kesultanan. Loyalitas ini mengemuka sebagai perekat bagi relasi pertukaran komoditas yang telah berlangsung antara kelompok-kelompok tersebut dengan Tidore. Orang-orang Papua di pesisir barat, yang dikenal sebagai pengelana dan penjarah, merupakan pemasok budak dan barang berharga lain seperti sagu dan tempurung kura-kura kepada pedagang dari Tidore (Widjojo 2013: 154–157, 161).

Periode pra-Kristen orang Kais juga memuat kisah tentang pertikaian antarkelompok, maraknya peperangan, eksistensi panglima perang atau raja, dan pelayaran *hong*. Orang Kais semula tinggal sebagai kelompok-kelompok kecil (klan) yang tersebar di dalam hutan sagu. Dari empat fam (marga) terbesar di Kais saat ini, yakni Asikasau, Saimar, Abago, dan Kaitao, semuanya memiliki rujukan lokasi asal-usul masing-masing. Orang Asikasau bertempat asal di wilayah Kampung Kais saat ini, yang dulu disebut tanah Bosiro. Sementara orang Saimar dan Abago memiliki leluhur yang sama dengan orang Bedare⁴ yang berasal dari hutan Moropipo di hulu Sungai Bedare.

Mereka tidak tinggal menetap (sedenter) dalam kampung dan rumah-rumah permanen seperti saat ini; perpindahan lokasi tempat tinggal mereka dipengaruhi oleh pertikaian dan aliansi antarkelompok. Misalnya, leluhur orang Saimar pergi meninggalkan lokasi asalnya di hutan Moropipo ke arah utara, menelusuri Sungai Metemani, hingga tiba di satu ‘dusun sagu’⁵ yang dinamai Jamarema dan menetap di sana selama beberapa waktu. Leluhur Saimar kemudian berlayar lagi sampai ke dusun Sapui dan menempati daerah tersebut bersama-sama dengan moyang orang Ergor sampai akhirnya terjadi pertikaian di antara mereka yang membuat orang Saimar kembali ke Jamarema. Setelah bermukim di Jamarema, kelompok ini pecah: satu kelompok pergi dan bermukim di muara kali Somuno—mereka menjadi leluhur orang Abago. Kelompok lain pergi ke Bosiro, bertemu dengan orang Asikasau yang bermukim

4. Penduduk di Kampung Saga, Distrik Metemani, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.

5. Sebutan untuk hutan tempat mencari nafkah.

di sana. Mereka meminta izin untuk hidup di wilayah tersebut, dan selanjutnya, seperti diucapkan *tete*⁶ Tomas Asikasau⁷, “masing-masing kelompok atur dia pu[nya] hidup.”

Kelompok-kelompok tersebut dikepalai oleh seorang pemimpin yang disebut panglima perang atau *raja*⁸. Mereka, selain berperan memimpin kelompok dalam periode migrasi atau perpindahan lokasi mukim, juga merupakan pemimpin perang. Sebagaimana dituliskan Widjojo, para panglima perang ini adalah pemimpin bagi operasi pelayaran-pelayaran di wilayah kepulauan sekitar pesisir barat Papua guna menjarah permukiman yang mereka jumpai dan mengambil di antara orang-orang tersebut untuk dijadikan budak. Seperti juga diceritakan Samuel Asikasau, panglima perang atau *raja* dari Bosiro dulu pergi berlayar memimpin pasukan untuk berperang hingga ke wilayah Teminabuan.

Bagi orang Kais saat ini, periode sejarah tersebut dipandang sebagai “zaman kegelapan”: ketika orang Kais masih kerap “baku bunuh”, belum mengenal pemerintah, agama, cara memasak, pakaian (modern), dan rumah papan. Meskipun hanya sedikit informasi yang bisa digali dari periode prakolonial, namun kelihatannya kekuasaan politik Tidore tidak bekerja secara langsung untuk mereorganisasikan ruang hidup dan populasi di wilayah pesisir barat Papua guna menyerap sumberdaya di kawasan itu. Kekuasaan politiknya dijalankan untuk menjamin pasokan komoditas berharga yang bisa disediakan tanpa campur tangan langsung ke dalam kehidupan populasi setempat. Demikian pula pada ranah ideologis, Tidore tampaknya tidak melakukan intervensi langsung dan sistematis untuk menggantikan kepercayaan lokal dengan nilai-nilai yang dibawa agama Islam. Keikutsertaan pemimpin-pemimpin Papua ke dalam agama Islam lebih terlihat sebagai usaha diplomatis untuk melancarkan pertukaran komoditas dan pernyataan loyalitas.

“Zaman kegelapan” berakhir ketika kekuatan ekonomi-politik baru datang dalam wujud pemerintah kolonial Belanda sekurangnya pada dekade awal 1900-an. Akhir dari “zaman kegelapan” ini merupakan transisi yang menyeret orang Kais ke dalam ritme kehidupan modern dan sistem ekonomi yang baru. Dari segi ekonomi, usaha pemerintah kolonial Belanda tampaknya tidak menggapai capaian signifikan. Secara umum, kegiatan eksploitasi alam berlangsung tersendat-sendat dan takoptimal, salah satunya karena kondisi alam yang menantang (Budiarjo dan Liong 1988: 29–30). Di kawasan Sorong Selatan, diketahui telah ada usaha budidaya pohon damar serta pengeboran sumber minyak. Ini dibuktikan dengan adanya peninggalan bekas gudang damar di Kampung Makaroro dan situs bekas pengeboran minyak di dekat Kampung

6. Panggilan untuk kakek atau orang tua/sepuh.

7. Semua nama informan adalah pseudonim, kecuali istilah *fam* (marga) dan nama-nama pejabat publik.

8. Lihat uraian Visser tentang peran *raja* dalam kelompok-kelompok penduduk di wilayah Kepala Burung. Istilah *raja*, yang diperoleh dari bahasa Melayu-Ambon merujuk pada pemimpin *indigenous* di wilayah Timur Indonesia yang memiliki relasi politik dan perdagangan dengan Kesultanan Tidore (Visser 2001: 80).

Puragi. Namun demikian, dalam aspek lain, pendudukan Belanda memiliki dampak signifikan melalui proses *pemberadaban* terhadap komunitas-komunitas pemburu-peramu. Hal ini saya pikir telah berperan penting dalam menyediakan landasan bagi inkorporasi orang Kais ke dalam sistem ekonomi yang baru, yakni dengan memukimkan para penghuni hutan (sedenterisasi), masuknya agama baru (Kristen), dikenalnya pemerintah, serta pendidikan modern.

Pelaksanaan kontrol terhadap Papua Barat oleh pemerintah kolonial Belanda baru terlaksana setelah parlemen Belanda mengalokasikan anggaran sebesar 115.000 gulden pada 1898. Dengan dukungan anggaran bagi pemerintahan kolonial, Belanda kemudian membagi daerah Papua Barat ke dalam dua bagian yang masing-masing dikuasai seorang kontrolir: bagian utara dinamakan Afdeeling Noord Nieuw-Guinea, bagian barat dan selatan dinamakan Afdeeling West- en Zuid Nieuw-Guinea. Kedua daerah itu menjadi subbagian dari Keresidenan Maluku. Wilayah Sorong Selatan termasuk dalam penguasaan Afdeeling West- en Zuid Nieuw-Guinea dengan kontrolir yang berkedudukan di Fakfak di wilayah Teluk Bintuni (Bachtiar 1984: 53). Memori tentang keberadaan Fakfak sebagai pusat pemerintahan karesidenan Belanda yang membawahi Kampoeng Baroe masih diingat oleh orang-orang tua Kais.

Titik tolak proses pemberadaban ditandai dengan usaha pemerintah kolonial dalam mengontrol orang dan tanah Papua Di Kais. Usaha ini dimulai dengan menarik klan-klan yang hidup tersebar di hutan sagu untuk dimukimkan di kampung permanen. Sebuah permukiman yang berlokasi di pinggir sungai Kais di tanah ulayat Bosiro milik orang Asikasau didirikan dan diberi nama Kampoeng Baroe—inilah cikal bakal Kampung Kais saat ini. Pemerintah kolonial Belanda mengerahkan tenaga kerja paksa yang terdiri atas orang-orang Kei dan Kepulauan Maluku lainnya untuk mendirikan kampung tersebut. Menurut cerita Tomas Asikasau, setelah Kampoeng Baroe didirikan, pemerintah mendatangkan polisi atau *marsose* dari daerah Fakfak (ibu kota residen kolonial) untuk mengusahakan penarikan orang-orang dari dalam hutan dan menempatkan mereka di Kampoeng Baroe. Polisi melakukan pendekatan kepada pemimpin kelompok dan memerintahkan mereka agar membawa anggota mereka untuk menetap di Kampoeng Baroe. Konon proses penarikan ini berlangsung dengan kekerasan dan paksaan. Para pemimpin tersebut juga menarik orang Awee yang di kemudian hari pergi untuk mendirikan Kampung Sumano dan Benawa.

Seperti dicatat Jan Boelaars, proses sedentarisasi ini tampaknya berlangsung secara luas di wilayah kepala burung semenjak 1924 ketika kepala pemerintah mulai bertugas di Inanwatan, dan setelah sebelumnya pada 1911 misi gereja dijalankan. Proses ini membawa pengaruh berarti dalam hal pasifikasi perang-perang kecil di antara kelompok-kelompok, terbentuknya desa-desa, pendidikan, misi gereja, serta dimulainya proyek sosial ekonomi seperti pembangunan rumah, fasilitas publik, dan pemberian pakaian (Boelaars 1986: 131). Bukti peninggalan bangunan kolonial di Kampung Kais masih dapat dijumpai saat ini di rumah mama Saimar, yang dulu merupakan rumah layanan kesehatan milik pemerintah Belanda, serta gedung gereja di Kampung Makaroro yang dahulu merupakan gudang penyimpanan getah pohon damar.

Setelah sedentarisasi dilaksanakan, misi gereja kemudian datang untuk membawa penyesuaian ideologi dan kultural ke dalam ritme kehidupan modern. Ini merupakan momentum krusial yang menandakan peralihan dari “zaman kegelapan” menuju era baru kehidupan orang Kais. Penyebaran agama Kristen (Protestan) ke Kais dilakukan pada 1916 oleh Pendeta Wetstein⁹, seperti telah diceritakan di muka. Salah satu jejak yang menandakan peralihan zaman itu dapat dilihat dari penamaan orang-orang Kais. Saat sedang menuturkan buku catatannya tentang sejarah orang Kais, Tomas Asikasau menunjukkan bahwa nama otentik orang Kais dulu hanya terdiri atas satu suku kata. Kakeknya, seorang panglima perang klan Asikasau, bernama Arawoi. Setelah dibaptis, sang kakek memiliki nama baru yakni Martin Asikasau. Setelah generasi sang kakek, tidak ada lagi individu Kais yang lahir dengan penamaan lama. Apa yang menarik adalah persepsi orang Kais saat ini terhadap kehidupan masa silam mereka. Tomas Asikasau mengatakan bahwa nama “asli” orang Kais sebagai “nama kafir”.

Nama baru menandakan munculnya suatu klasifikasi dan simbol baru yang hadir dalam kehidupan orang Kais. Nama baru ini juga menjadi artefak yang menandai keluarnya mereka dari “zaman kegelapan”. Suku kata pertama adalah nama-nama tokoh yang diambil dari kitab Injil (seperti Martinus, Matheis, Gideon), sedangkan suku kata kedua merupakan penanda keanggotaan fam atau margas (Asikasau, Saimar, Abago, Kaitao). Dari sudut pandang ‘orang luar’, penamaan yang baru ini tentu memudahkan pengamat dalam mengenali individu beserta keanggotaan marganya, ketimbang nama yang hanya satu suku kata, yang mungkin berbeda-beda bunyinya dan sangat beragam (ada tiga bahasa lokal di Kampung Kais!). Gagasan yang memandang sejarah masa silam mereka sebagai sesuatu yang “kafir” (melihat diri mereka di masa yang lalu

9. Meski orang Kais percaya bahwa Pendeta Wetstein berkebangsaan Jerman, namun sepertinya organisasi yang menaunginya adalah zending yang berbasis di Belanda: Utrechtsche Zendingvereniging atau Zending der Nederlandsch Hervormde Kerk (lihat Koentjaraningrat 1984: 56).

sebagai yang “liyan”) mengesankan adanya suatu penerimaan pada diri orang Kais sendiri atas proses pemberadaban yang mereka alami.

Sebagaimana dicatat Visser (2001), masa pendudukan oleh Belanda memiliki arti penting dalam hal perluasan pemerintahan modern bagi kehidupan orang Papua, sebagai bagian dari pembangunan regional yang juga disertai pembangunan pertanian, infrastruktur, dan ekonomi. Tugas pertama dari para administrator Belanda adalah melaksanakan kebijakan kependudukan yang kemudian diikuti oleh masuknya misi gereja serta pendidikan modern yang bertujuan untuk menciptakan warga negara modern (Visser 2001: 70–73). Berdasarkan keterangan ini, juga pengalaman yang dituturkan orang Kais sendiri, saya melihat bahwa peran penting Belanda terletak pada proses pemberadaban (sedentarisasi, pengaturan kependudukan oleh pemerintah/birokrasi modern, pengenalan agama baru, dan pendidikan modern), yang pada gilirannya menyediakan prakondisi bagi proses inkorporasi lebih dalam ke dalam ekonomi global. Inkorporasi ini dimungkinkan dengan dibukanya jalan bagi kapital untuk berakumulasi melalui pengerukan sumberdaya alam Papua, terutama sejak pemerintahan Soeharto.

Eksplorasi sumberdaya alam Indonesia meningkat pesat setelah Soeharto dan rezim Orde Baru-nya berkuasa sejak 1966. Ada tiga undang-undang penting yang diluncurkan Soeharto untuk melancarkan ekstraksi sumberdaya dalam skala luas yang hanya mungkin dapat terlaksana dengan melibatkan perusahaan asing. Regulasi pertama yakni UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang memberikan prosedur bagi perusahaan asing untuk beroperasi di Indonesia; kedua, UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, yang menyatakan bahwa semua kawasan hutan ada di bawah kendali negara; dan ketiga, UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menyatakan bahwa semua lahan di kawasan Indonesia dapat digunakan untuk pertambangan. Melalui serangkaian kebijakan tersebut, Orde Baru telah dengan jelas menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia dengan bantalan ekstraksi sumberdaya alam yang digerakkan oleh kapital internasional (Resosudarmo 2005: 2–3). Uraian selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana dua aktivitas ekstraksi, yakni konsesi kayu dan perkebunan monokultur, dilaksanakan di kawasan hutan Sorong Selatan khususnya sebagaimana dialami oleh orang Kais.

Penyewaan besar-besaran kawasan hutan di luar Pulau Jawa kepada konsesi kayu swasta dilapangkan setelah terbitnya undang-

undang tentang penanaman modal asing dan modal dalam negeri, masing-masing pada 1967 dan 1968, tepat di masa-masa awal pemerintahan Orde Baru (Potter 2002: 447). Dalam perkembangannya, aktivitas ekstraktif pengambilan kayu yang didominasi modal swasta asing, terutama dari Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia, kemudian diperbaharui sejak 1975 agar melibatkan modal perusahaan Indonesia dalam bentuk usaha patungan (Potter 2002: 448). Skema baru lisensi ini secara eksklusif diberikan Presiden Soeharto kepada pengusaha-pengusaha kroninya serta melibatkan militer dalam operasionalisasinya (Budiarjo dan Liong 1988: 37). Dalam pengamatan Potter (2002: 459), meskipun pola ekstraksi pohon-pohon kayu hutan telah mengalami perubahan dalam tiap fase kebijakan, mulai dari periode kayu gelondongan mentah, kayu lapis, hingga modal perkebunan, pada dasarnya aktivitas ini tetap berciri destruktif serta memandang usaha pelestarian sebagai sesuatu yang kurang penting ketimbang pengejaran terhadap nilai komersial kayu dan keuntungan jangka pendek.

Potter (2002: 459) juga menyinggung bahwa situasi di atas pada gilirannya memunculkan polemik tentang subjek penguasaan tanah, termasuk dengan munculnya berbagai respons masyarakat lokal pada kawasan hutan yang dianggap steril dalam peta negara. Saya menduga respons lokal ini berbeda-beda menurut periode waktu dan tempat serta situasi kepentingan ekonomi dan kekuatan politik dari rezim yang berkuasa. Misalnya, berdasarkan laporan seorang Uskup di Agats pada 1980-an, Budiarjo dan Liong (1988: 37) mencatat bahwa dalam rezim otoritarian Orde Baru, penebangan-penebangan kayu dikawal oleh tentara dan penduduk lokal ditekan sampai pada titik situasi menyerupai kerja paksa dengan upah sangat kecil dan beban kerja yang berat untuk menjadi tenaga kerja dalam usaha-usaha penebangan kayu berharga seperti kayu besi. Dengan kata lain, aktivitas produksi ekstraktif ini dibarengi dengan tindakan-tindakan pelanggaran HAM.

Namun, dalam fase historis dan situasi ekonomi-politik yang lain, kondisinya bisa berbeda. Pada konteks Kais, orang-orang masih ingat bahwa setidaknya dimulai sekitar 1994, sebuah perusahaan bernama PT Korindo telah beroperasi di kawasan hutan mereka untuk mengambil pohon merbau (besi) yang konon digunakan sebagai bahan baku tripleks. Akan tetapi, meskipun masa konsesinya belum habis, perusahaan ini berhenti beroperasi pada 2003. Menurut desas-desus, sisa masa kontrak tersebut diberikan kepada perusahaan Malaysia, yang dalam praktiknya dipandang melakukan penebangan ilegal (*illegal logging*), guna mengambil kayu-

kayu merbau yang dikenal berkualitas dan bernilai jual tinggi.¹⁰ Begitu pula, para lelaki dewasa Kais mengatakan bahwa banyak ‘pohon besi’ berukuran besar kebanyakan sudah ditebangi pada “zaman HPH”. Penebangan ini melibatkan transaksi antara pemilik hak tanah ulayat dengan “*buyer*” (pembeli). Istilah “*buyer*” digunakan orang Kais untuk menunjuk pembeli kayu yang mereka kenali sebagai orang Malaysia. Selain menjual pohon yang tumbuh di tanah ulayat mereka, para lelaki dewasa Kais jugalah yang diupah untuk kerja penebangan. Seorang lelaki mengatakan bahwa pada masa itulah mereka mengenal “uang merah” alias lembar pecahan Rp100.000, sekalipun tidak jelas seberapa diuntungkan orang Kais dari penjualan pohon-pohon besi tersebut.

Namun demikian, aktivitas penebangan pohon telah menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius. Dalam suatu diskusi kelompok terarah dengan laki-laki dewasa Kais,¹¹ mereka menuturkan bahwa telah terjadi perubahan fisiologi Sungai Kais. Pada masa orang-orang tua dahulu, Sungai Kais nisbi lebih sempit dari lebar badan sungai saat ini, dan konon lebih dalam. Ada dua hal, dalam analisis orang Kais, yang menyebabkan sungai makin melebar dan cenderung dangkal. Pertama, penebangan pepohonan kayu besi yang berdiri di dekat bantaran sungai. Maraknya penebangan di zaman *illegal logging* ini membuat tepian sungai yang notabene lahan gambut kehilangan akar-akar pohon yang berfungsi memadatkan lapisan tanah. Pada sesi lain, peserta juga mengakui bahwa semenjak ramai penebangan pohon, hewan-hewan buruan seperti babi dan rusa pergi lebih jauh ke dalam hutan. Bersamaan dengan itu, meningkatnya lalu lintas *longboat*¹² dan kapal di Sungai Kais yang lajunya menimbulkan gelombang relatif lebih besar dan kuat ketimbang laju perahu dayung telah membuat tepi daratan yang sudah lemah tadi mudah mengalami erosi sehingga lama-kelamaan memperlebar badan sungai. Peningkatan arus lalu lintas tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas industri ekstraktif yang terjadi di arah hulu Sungai Kais, yakni penebangan kayu di konsesi perusahaan PT Wanagalang Utama serta transportasi kapal tongkangnya yang membawa kayu-kayu hutan, pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Kais, serta hilir mudik angkutan logistik guna menunjang pembangunan perkebunan kelapa sawit ANJ.

Aktivitas ekstraktif lainnya yang melibatkan orang Kais ke dalam relasi kapital-tenaga kerja adalah pembukaan perkebunan kelapa sawit milik kelompok ANJ¹³ yang dioperasikan anak perusahaan mereka, PT Putera Manunggal Perkasa (PMP) dan PT Permata

10. Sebagai perbandingan untuk melihat periode penjarahan hutan pada masa transisi Reformasi, lihat Lounela (2002).

11. Diskusi kelompok terarah dengan peserta laki-laki dewasa dan orang tua yang tidak bekerja di perusahaan, Jumat 23 Juni 2017.

12. Perahu bermesin dengan kapasitas penumpang sekitar 10–15 orang.

13. Untuk profil perusahaan ANJ, lihat tapakmaya perusahaan: <https://anj-group.com/id/our-profile-1>.

Putra Mandiri (PPM), dengan total luasan konsesi lahan 91.209 hektare. ANJ memperoleh izin lokasi dari Bupati Sorong Selatan pada Agustus 2010. Wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit ANJ terletak di tanah ulayat orang Awee, orang Iwaro, dan orang Kais (beberapa fam saja seperti Kaitao, Bandi, dan Saimar), namun yang kena dampak paling signifikan bagi kehidupan mereka adalah orang Awee dan Iwaro.¹⁴ Sama seperti tetangganya, orang Awee juga hidup dari berburu, meramu, dan mengolah sagu. Sebelum perusahaan datang, selain untuk memenuhi kebutuhan subsisten, mereka juga menjual tepung sagu basah, dendeng, dan ulat sagu ke wilayah Distrik Kais Darat seperti Kampung Mukamat dan ke arah Distrik Moswaren. Pendapatan dari penjualan itu ditukar untuk membeli kebutuhan harian lain di antaranya gula dan vetsin.¹⁵ Setelah perkebunan kelapa sawit memasuki masa pembibitan dan penanaman, sebagian besar orang Awee yang bermukim di Kampung Sumano I dan Benawa bekerja ke perkebunan sebagai buruh harian lepas atau tenaga kerja borongan. Tidak heran apabila sepanjang siang selama Senin-Sabtu, kita akan menemukan suasana kampung begitu sunyi karena orang-orang pergi ke Blok B dan Blok C (perkebunan) untuk bekerja. Selain orang Awee sendiri, operasi kerja perkebunan kelapa sawit juga menarik orang Kais untuk bekerja dalam posisi yang sama. Pada paruh akhir 2016, setidaknya enam puluh orang Kais, kebanyakan laki-laki dan sedikit perempuan, bekerja di sana.¹⁶

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, dua topik hangat yang selalu menarik dalam percakapan sehari-hari orang Kais yakni berbagai masalah seputar pembayaran “uang pintu masuk” dalam proses pelepasan tanah ulayat kepada perusahaan, yang mengindikasikan adanya konflik horizontal antarfam (terkait batas dan klaim atas tanah ulayat) ketimbang konflik vertikal antara orang setempat dengan perusahaan, serta cerita-cerita seputar proses kerja dalam aktivitas produksi perkebunan kelapa sawit. Di sini saya secara ringkas akan mengemukakan masalah yang kedua saja, dengan alasan bahwa pertautan moda produksi kapitalis dan moda produksi berlandaskan kekerabatan dapat disoroti dengan lebih jelas pada ranah proses kerja.

Berkenaan dengan proses kerja, dalam hal asal-usul serta komposisi pekerja (Wolf 1982: 358) perkebunan, sifatnya berbeda-beda menurut tahap-tahap pembangunan industri terkait spesialisasi pekerjaan yang diperlukan dalam operasi industrial tersebut. Setelah memperoleh izin konsesi pada 2013, tahap awal pekerjaan adalah pembukaan lahan (*land clearing*) yang sebelumnya didahului oleh pemetaan ganti rugi atas tanaman serta pemetaan areal lahan.

14. Untuk laporan tentang sengketa lahan, pembabatan hutan alami di wilayah konsesi ANJ, dan konflik dengan penduduk setempat, lihat laporan Greenomics Indonesia (2014).

15. Konon pada 1960-an, orang Awee di Kampung Benawa pergi mendayung ke Kampung Kais hanya untuk membeli vetsin.

16. Catatan lapangan semester 1 (Agustus–Oktober 2016) oleh Carolina Astri.

Proses pembukaan lahan, termasuk penebangan hutan, tidak dilaksanakan menggunakan tenaga kerja setempat, melainkan dioperasikan oleh kontraktor dengan pasukan tenaga kerja dari luar Papua, yakni para pekerja dari Jawa Timur dan kawasan Indonesia timur lainnya. Baru pada 2016, penduduk lokal dilibatkan sebagai tenaga kerja, setelah pembangunan industri memasuki tahap tanam dan perawatan. Penduduk dari beberapa kampung, yakni Sumano, Benawa, Makaroro, dan Kais-Tapuri, direkrut hanya sebagai buruh harian lepas (termasuk penjaga keamanan) dan buruh borongan, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara barisan pekerja di kantor perkebunan dan lini manajerial merupakan pekerja dari Jawa dan Sumatera.

Di sini perlu digarisbawahi ihwal kapan orang Kais terlibat dalam kerja perkebunan kelapa sawit. Sejak Perhutani memperoleh izin konsesi untuk pembangunan industri sagu pada 2012, orang Kais sudah dilibatkan sebagai tenaga kerja pembangunan lokasi pabrik sejak 2015. Kerja upahan dalam proses pembangunan pabrik ini tidak berlangsung penuh sepanjang tahun. Ketika pekerjaan di pabrik sagu berhenti sementara, para pekerja kemudian melihat kesempatan di perkebunan kelapa sawit sebagai alternatif dan beralih untuk bekerja di sana. Namun ketika pekerjaan di perkebunan sudah selesai dan mereka dapat rehat sejenak dari ritme industri, selanjutnya, ketika pabrik sagu beroperasi kembali, orang Kais pun kembali masuk ke sektor industri sagu. Ini menjadi konteks yang penting untuk diperhatikan, ketika keberadaan beberapa sektor industri dapat memberi pilihan bagi orang Kais untuk bekerja. Sepanjang terdapat akses pekerjaan yang bisa mereka geluti di sektor industri, mereka cenderung akan terlibat ke dalam relasi kerja upahan industrial ketimbang hanya melakoni aktivitas produksi subsisten tradisional.

Momentum pengerahan tenaga kerja penduduk setempat untuk dilibatkan ke dalam operasi industrial dapat memperlihatkan bagaimana moda produksi kapitalis dapat bekerja melalui kinerja pengorganisasian tenaga kerja “tradisional” dalam corak berlandaskan kekerabatan.¹⁷ Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, ketika dalam proses transaksi lahan yang melibatkan pembayaran “uang pintu masuk” perusahaan berinteraksi dengan pemimpin suku dan fam sebagai wali dari kelompoknya, dalam proses berikutnya, perusahaan juga membangun relasi dengan para wali tersebut dengan menempatkan mereka sebagai kepala-kepala unit yang berperan dalam pengerahan tenaga kerja, yang direkrut dari suku dan fam masing-masing, untuk bekerja dalam ragam pekerjaan tertentu. Sebagai imbalan, perusahaan memberikan “porsi” pen-

17. Analisis serupa juga dapat dilihat dalam uraian Visser tentang keterlibatan klan-klan di wilayah Teminabuan, dengan kasus penduduk Waigeo dan Konda, dalam aktivitas *logging* dan budidaya udang. Visser mencermati bagaimana dua aktivitas industri tersebut dapat bekerja dengan memanfaatkan organisasi sosial setempat dengan peran penting *raja* (pemimpin kelompok) dalam mengorganisir tenaga kerja (Visser 2001: 78–83).

dapatan yang lebih besar bagi para wali tersebut ketimbang regu pekerjaanya.¹⁸

Sebagai contoh, salah satu orang Kais bernama Andreas Kaitao menuntut pembayaran “uang pintu masuk” ketika tanah ulayat fam Kaitao ternyata tercakup ke dalam wilayah konsesi, sementara pembayaran dana tersebut baru diberikan kepada orang Awee yang tanah ulayatnya bersebelahan dengan milik Kaitao. Andreas kemudian direkrut sebagai koordinator mandor dengan tugas merekrut mandor-mandor dan mengoordinasikan pekerjaan mereka. Alokasi pekerjaan didasarkan pada kebutuhan/permintaan perusahaan. Sistem kerja yang berlaku adalah borongan; koordinator mandor diberi satu paket pekerjaan tertentu, seperti perawatan tanaman, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan besaran upah tertentu. Semua mandor adalah orang Kais, dan pada gilirannya mandor-mandor ini juga merekrut warga sekampungnya sebagai anggota regu pekerja. Andreas membawahi 4 orang mandor dengan jumlah pekerja sekitar 5–10 orang pada tiap mandor. Dalam kasus tertentu, perekrutan pekerja rupanya mengikuti prarasa hubungan kerabat, di samping kepercayaan atas orang yang direkrut. Misalnya, Antonius Abago masuk ke dalam regu pimpinan mandor Yohanes Hohame yang notabene masih kerabat istrinya, Maria Bandi. Mandor juga bertugas untuk mendistribusikan upah yang diperoleh dari koordinator mandor, dan koordinator itu sendirilah yang berhubungan langsung dengan pihak perusahaan dalam transaksi upah. Regu di bawah mandor biasanya memperoleh pekerjaan yang sama tetapi lokasinya berbeda-beda.

Dalam sistem borongan, pembayaran upah dilakukan setelah hasil kerja dicapai. Berdasarkan cerita para pekerja, dapat diidentifikasi bahwa salah satu mekanisme ekstraksi nilai lebih atau eksploitasi terhadap tenaga kerja setempat terjadi di antaranya melalui sistem *kashon*. Misalnya, untuk kerja perawatan, perusahaan menetapkan upah Rp310.000/hektare dengan target waktu sebulan. Satu regu pekerja yang dimandori oleh Simson Tebe mengerjakan 60 hektare dalam sebulan di satu blok, sehingga ia dan anak buahnya memperoleh upah sebesar Rp1.860.000/bulan. Namun, upah riil yang diterima tiap anggota regu ternyata tidak pernah sama, bahkan ada pekerja yang pernah menerima hanya Rp500.000. Upah di muka tadi rupanya dipotong untuk biaya makan harian yang dimasak oleh istri Simson. Ketika para pekerja ini bekerja di lokasi yang cukup jauh dari kampung dan mereka tidak bisa membawa istri untuk membantu memasak, maka kebutuhan makan bergantung pada jasa koki yang disediakan oleh istri mandor. Ditambah lagi, lokasi yang terpencil dan sumber pangan hanya bisa

18. Cara ini berbeda dengan yang terjadi pada konteks industri sagu Perhutani di mana perusahaan memprakarsai pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bertugas sebagai “perantara” yang salah satu tugasnya mengerahkan tenaga kerja dan pasokan tual sagu.

mengandalkan logistik yang disediakan perusahaan, maka mau tak mau bahan pangan mesti dibeli dari perusahaan. Artinya, dari besaran upah tersebut, sebagiannya berpulang kembali ke kantong perusahaan. Pembelian bahan pangan (termasuk pula gula, kopi, teh, dan rokok) dengan cara “berhutang” dan dibayar melalui pemotongan upah setiap kali pekerja menerima gaji, inilah yang dimaksud sebagai *kasbon*.

Di sisi lain, munculnya aktivitas ekonomi di lokasi pelosok memancing datangnya para pedagang alias mendekatnya pasar ke jangkauan konsumen. Sudah disinggung sebelumnya bahwa dahulu orang Sumano dan Benawa mesti turun ke Kampung Kais hanya untuk membeli vetsin. Ketika perkebunan dibuka, secara berkala *jolor*¹⁹ akan datang ke dua kampung tersebut, juga ke Kerekano, lokasi selter dan dermaga logistik perusahaan sekaligus permukiman pekerja kebun, khususnya setiap momen pencairan upah pekerja. *Jolor* menjajakan komoditas pabrikan yang diproduksi mungkin di kota besar Papua atau situs industri di pulau-pulau lainnya. Mulai dari bahan pangan pokok, perabot rumah berbahan plastik, sampai barang hiburan elektronik seperti pengeras suara dan pemutar musik MP3 (tidak ada komoditas hasil produksi bengkel-bengkel kerja lokal di sini). Maka, pada hari pembayaran upah pekerja, pada hari itu pula dermaga tempat *jolor* merapat ramai seperti pasar kaget. Kembali ke soal upah, selain dipotong melalui kasbon, upah riil pekerja akan mengalir pula ke kantong-kantong pedagang *jolor* untuk barang-barang konsumsi di atas.

Berbeda halnya dengan orang Awee yang mengalami proletarianisasi dengan didahului oleh akumulasi primitif yang melepaskan tanah ulayat mereka ke tangan perusahaan, sebagian besar orang Kais yang masuk ke dalam sirkuit akumulasi kapital tidak mengalami lebih dulu pelepasan lahan. Orang Kais, dalam hal ini laki-laki dewasanya, mencerminkan karakter kelas ganda (Bernstein 2010), ketika di satu sisi mereka adalah pemilik sarana produksi tetapi di sisi lain menjadi buruh. Dari perspektif ragam kehidupan, hadirnya perkebunan kelapa sawit memang menambah opsi pekerjaan di luar aktivitas produksi tradisional, dan secara subjektif orang Kais memandangnya sebagai kesempatan baru dalam memperoleh uang tunai di luar cara konvensional (menjual hasil alam). Lebih jauh lagi, meningkatnya intensitas keterlibatan orang Kais ke dalam relasi kerja upahan ini (komodifikasi tenaga kerja) berimplikasi pada meningkatnya partisipasi mereka ke dalam ekonomi pasar; kecenderungan terjadinya komodifikasi subsistensi (Bernstein 2010: 49).

19. Perahu yang berfungsi sebagai toko keliling, milik para pedagang Bugis atau Buton. Mereka bertolak dari kota Teminabuan, menyusuri sungai-sungai besar lalu bersandar untuk beberapa hari dari satu kampung ke kampung lain di kawasan pedalaman pesisir Sorong Selatan.

Aspek lain dari masuknya industri ke Papua Barat yang melibatkan populasi setempat adalah penguatan peran uang, dan pada gilirannya pertukaran via pranata pasar, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Uang tidak hanya diperoleh dari kerja upahan di sektor industri saja, namun juga dari proyek yang disokong dana-dana pembangunan, seperti Alokasi Dana Desa dan Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek), dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan dan rumah modern, misalnya. Dengan demikian, pembangunan industri di kawasan ini juga didampingi dengan pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar publik seperti jalan, fasilitas listrik, telekomunikasi, dan bangunan. Peningkatan intensitas pembangunan dalam dua ranah tersebut membawa konsekuensi penting, yakni menguatnya 1) peranan uang dalam kehidupan sehari-hari; 2) relasi kerja upahan sebagai sumber perolehan uang; dan 3) peranan pranata pasar (*market system and market-place*) dalam memperoleh kebutuhan harian. Secara khusus, keberadaan industri *logging* dan perkebunan kelapa sawit memiliki implikasi penting yang memunculkan:

- a. kecenderungan mantapnya pembagian kerja secara gender, dalam konteks pertautan moda produksi berlandaskan kekerabatan dan kapitalis, dengan meningkatnya keterlibatan laki-laki dalam aktivitas produksi kapitalistis dan perempuan yang tetap di ranah ekonomi domestik;
- b. dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan kolektif pada konteks pelepasan lahan maupun pengerahan tenaga kerja untuk pekerjaan di sektor industri, semenjak laki-lakilah yang mempunyai otoritas terhadap tanah ulayat dan pengorganisasian tenaga kerja;
- c. karakter ganda orang Kais, sebagai pemilik sarana produksi namun juga buruh; akan tetapi, perlu dicermati bahwa tidak seperti petani, karakter ganda ini muncul di dalam dua ranah aktivitas produksi berbeda: mereka secara *de facto* memiliki tanah ulayat tetapi pergi keluar dari pekerjaan tradisional di tanah ulayatnya sendiri untuk menjadi buruh di dalam aktivitas produksi kapitalis. Situasi ini akan muncul dalam bentuk yang lain pada konteks industri sagu, yang akan dibahas kemudian.

Orang Kais dan Moda Produksi Mereka

Siapa yang dimaksud dengan orang Kais? Di wilayah Sorong Selatan, secara administratif, Kais adalah nama salah satu distrik yang

mencakup dua belas kampung. Pusat distrik ini terletak di Kampung Kais. Secara keruangan, penduduk Sorong Selatan mengenal ada dua Kais. Pertama, Kais Darat, merujuk pada kampung-kampung yang berlokasi di wilayah daratan: Siranggo, Ikana, Haimaran, Mogatemin, Onimsefa, dan Mukamat. Secara kultural, penduduk Kais Darat banyak mengandung elemen budaya orang Maybrat sebab banyak perkawinan terjadi dengan penduduk dari wilayah dataran tinggi tersebut, yang memang secara keruangan lokasinya berdekatan. Kedua, yakni Kais Pantai yang terdiri atas Kais, Tapuri, Yahadian, Makaroro, Sumano, dan Benawa, yang terletak di tepian Sungai Kais, lokasinya relatif dekat pesisir dan masih terpengaruh pasang surut air laut. Toponimi lokal bagi kampung Kais-Tapuri adalah Bosiro, sebelum pemerintah Belanda mendirikan permukiman bernama Kampoeng Baroe yang menjadi cikal bakal kampung Kais-Tapuri saat ini.

Orang Kais yang dibicarakan berikut ini adalah penduduk Kais Pantai yang bermukim di Kampung Kais dan Tapuri. Perlu dicatat, nama kampung-kampung di atas tidak berarti merujuk pada nama suku-suku yang tinggal di kampung tersebut. Penduduk di kampung Kais-Tapuri secara umum dikenal sebagai orang Kais, tetapi penduduk di Kampung Sumano dan Benawa dikenal sebagai orang Awee. Dalam kategori yang disebut orang Kais sendiri, di dalamnya terdiri atas beberapa fam atau *keret* (marga), di antaranya yang paling besar adalah marga Saimar, Abago, Asikasau, dan Kaitao. Secara linguistik, fam-fam tersebut memiliki bahasa ibu masing-masing: bahasa Mameri untuk fam Saimar dan Abago, bahasa Kaitao, dan bahasa Asikasau. Namun sehari-hari, orang Kais hari ini bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia dialek Papua. Beberapa anggota fam lain menetap di Kais karena ikatan perkawinan, dan marga-marga ini umumnya berasal dari kampung-kampung lain yang relatif dekat seperti Yahadian, Makaroro, serta Kampung Saga, Mugim, Tawangire, dan Puragi yang masuk ke dalam Distrik Metemani.

Kampung Kais-Tapuri dihuni oleh 517 jiwa yang terbagi ke dalam 140 kepala keluarga. Ada sekitar sembilan puluh rumah di kampung Kais-Tapuri. Di antara penduduk pribumi Papua, terdapat pula penduduk bersuku-bangsa lain, yakni orang Bugis dan Toraja. Mereka bekerja sebagai pedagang (membuka warung kecil), tenaga kesehatan, dan guru. Jumlah mereka tidak sampai dua puluh orang.

Seperti halnya komunitas-komunitas pemburu-peramu di belahan dunia lain yang sangat bergantung pada lingkungan hidup alamiahnya, begitu pula dengan orang Kais. Mereka menjalani gaya hidup “apa yang diperoleh hari ini, dikonsumsi hari ini.” Orang

Kais tidak mengenal konsep menyimpan persediaan makanan layaknya kaum tani atau orang kota. Satu-satunya bahan makanan yang mereka simpan di rumah adalah tepung sagu sebagai bahan pangan pokok. Dalam kadar yang kecil, bisa jadi ada penyimpanan daging, namun hal ini tidak berlaku reguler. Satu-satunya yang bisa disimpan secara berkala adalah kayu bakar untuk perapian di kala masak. Ketika laki-laki Kais berhasil memperoleh hewan buruan seperti babi hutan atau rusa, maka hal yang diprioritaskan adalah membagi daging hasil buruan tersebut ke anggota keluarga besar (*extended family*). Untuk sebagian besar, kebutuhan pangan mereka seperti sayur-mayur, daging, dan buah-buahan dipenuhi pada satu hari dan untuk dikonsumsi hari itu juga. Aktivitas untuk memenuhi sarana hidup dasar ini diekspresikan ke dalam dua kosakata: *mencari* dan *tokok sagu*. *Mencari* merujuk pada ragam kerja untuk memperoleh sayur, daging, kayu bakar, dan hasil bumi. Sedangkan *tokok sagu* berarti kerja mengambil isi atau pati dari pohon sagu untuk digunakan sebagai bahan pangan pokok. Dua aktivitas dasar orang Kais itu berlangsung di—dan dipenuhi dari—hutan dan sungai. Seperti salah satu ungkapan yang pernah saya dengar: “ko mau pigi cari makan, cari kayu, pigi sudah [ke hutan].”

Orang Kais memilah ruang hidup mereka (selain kampung tempat bermukim) ke dalam tiga kategori ruang, yakni *tanagubu* (hutan rimba), *tanaobu* (dusun sagu), dan *sode* (*sode mafado* = sungai besar; *sode afote* = sungai kecil/kali). *Tanagobu* adalah hutan rimba yang masih penuh dengan pohon, belum ditanami kelapa dan tanaman-tanaman lain. Hutan rimba adalah ruang jelajah atau tempat laki-laki dewasa dan remaja (dalam transisi menuju fase dewasa) berburu bermacam hewan seperti babi, rusa, kasuari, dan juga mencari ulat sagu (*mosaino*). Perempuan tidak *mencari* sampai ke hutan rimba sebab bagi mereka lokasinya terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Sedangkan *tanaobu* adalah tempat *mencari* yang “dekat-dekat saja.” Baik laki-laki maupun perempuan bisa *mencari* di sini. Inilah tempat orang menokok sagu, mencari sayur, mengumpulkan kayu bakar, tanam kelapa, pisang, memancing, dan mencari kayu untuk membuat perahu. Orang Kais juga membuat rumah kayu atau *morokunano* sebagai tempat tinggal mereka ketika *mencari* di dusun. *Morokunano* sekaligus berfungsi sebagai penanda bahwa dusun tersebut “berpenghuni.” Kemudian, sungai juga merupakan tempat *mencari*, baik bagi laki-laki atau perempuan, berbagai sumber protein hewani seperti udang, ikan, siput, dan kura-kura. Sungai dan dusun sagu saling berkaitan. Orang Kais menamai dusun sagu dengan nama-nama sungai dan kali (cabang sungai) yang melintasi dusun tersebut. Oleh karena

itu, ketika seseorang menunjuk dusun tertentu, maka itu artinya ia juga sekaligus merujuk pada sungai atau kali yang menjadi “jalan” sekaligus penanda bagi dusun tersebut. Toponimi ini menunjukkan bagaimana hutan (dusun sagu) dan sungai dipandang sebagai satu paket dalam kultur orang Kais; sebagai penyangga kehidupan mereka.

Selain klasifikasi di atas, hutan juga terpilah-pilah berdasarkan aspek kepemilikan, terutama untuk kategori dusun sagu. Akses atas sumberdaya hutan diatur melalui pranata kekerabatan, semenjak hutan “dimiliki” secara komunal oleh fam. Orang Kais dan suku-suku lain seperti Awee dan Iwaro yang hidup bertetangga dengannya mengenal konsep “tanah bersambung” yang berarti bahwa seluruh hamparan hutan “sudah ada yang punya.” Batas tanah ulayat orang Kais adalah tanah ulayat orang Awee, orang Iwaro, dan seterusnya. Dengan demikian, tidak ada tanah yang tidak bertuan. Batas internal, yakni batas tanah ulayat dari satu fam ke fam lain, dan juga batas eksternal, dari satu suku ke suku lain, bersifat lentur dengan penanda batas alamiah (pohon atau sungai). Lentur di sini berarti bahwa batas itu tidak kaku, dan dalam batas-batas tertentu, orang bisa mengambil sumberdaya yang bisa jadi sudah masuk ke wilayah fam atau suku lain, dengan izin lisan baik sebelum atau setelah mengambil, misalnya ketika seseorang menebang pohon sagu untuk keperluan makan sehari-hari. Pengetahuan tentang wilayah tanah ulayat dan batas-batasnya, termasuk pemilik tanah ulayat di luar batas-batas tanah mereka, dimiliki oleh orang-orang tua melalui transmisi lisan dari generasi sebelumnya yang kemudian ditransmisikan ke generasi berikut, di antaranya melalui praktik sehari-hari manakala orang tua dan anak-anaknya sedang *mencari* ke dusun atau hutan.

Klaim suatu fam atas wilayah tertentu didasarkan pada peneuman lokasi yang belum pernah dijadikan tempat hidup oleh kelompok lain, atau jika pun telah didiami oleh kelompok lain, terdapat kesepakatan untuk membagi wilayah penghidupan masing-masing. Klaim ini berupa cerita riwayat leluhur ketika menemukan lokasi hutan tempat mereka mencari makan yang ditransmisikan secara lisan ke generasi penerusnya. Seperti sudah disinggung pada bagian sebelumnya, pada masa lalu orang Kais dan suku-suku lainnya masih menjalani pola hidup berpindah-pindah tempat di sepenjuru kawasan hutan. Contohnya, kisah fam Tebe yang mencari makan di dusun sagu Mugarai. Leluhur fam Tebe berasal dari wilayah pegunungan daerah Maybrat. Dikisahkan nenek moyang Tebe turun dari daerah gunung ke arah muara sungai untuk mencari penghidupan. Suatu waktu mereka tiba di lokasi dusun sagu

Mugarai sekarang dan melihat tampaknya lokasi ini cocok untuk dijadikan tempat tinggal dan mencari makan. Di sana, mereka bertemu dengan moyang orang marga Kaitao. Moyang Tebe bertanya, bisakah kita mencari makan di sini. Moyang Kaitao berkata bahwa lokasi tersebut “tidak ada penghuninya.” Maka mulailah moyang Tebe tinggal di lokasi yang dinamai Mugarai dan mencari makan di situ sampai hari ini. Keturunan Tebe sampai hari ini berhak mencari makan (mengambil sumberdaya) di dusun sagu Mugarai. Dengan kata lain, ada banyak keluarga batih yang mempunyai hak untuk memanfaatkan sumberdaya alam pada satu dusun sagu.

Bagaimana pranata kekerabatan mengatur akses atas sumberdaya alam? Pertama-tama, pengaturan akses diarahkan pada wilayah hutan dan dusun sagu, tidak termasuk sungai.²⁰ Setiap orang Kais mestilah lahir di dalam satu keluarga batih di bawah naungan marga sang bapak. Anak-anak dianggap sebagai anggota fam bapaknya yang ditandai dengan penyematan nama fam bapak pada nama belakang mereka. Sebagai anggota dari suatu keluarga batih, baik anak laki-laki maupun perempuan, mereka dilibatkan dalam kerja menokok sagu dan *mencari* sejak kanak-kanak. Seorang anak laki-laki akan memperoleh hak untuk mencari penghidupan sendiri (menokok sagu dan *mencari*) ketika ia telah menikah. Selama belum menikah, kedudukannya sebagai anak dalam arti lain berarti hanya patuh pada titah orang tua, termasuk di ranah aktivitas subsisten. Begitu pula dengan anak perempuan. Meski demikian, seorang anak perempuan, dalam banyak kasus, akan kehilangan hak untuk *mencari* di dusun fam bapaknya ketika ia sudah menikah²¹ sebab ia dianggap sudah “dibeli” oleh fam suaminya dan karena itu ia ada di bawah tanggung jawab suami; dalam bahasa orang Kais, “sudah ikut (marga) suami.” Ini berarti bahwa anak perempuan tersebut akan mencari penghidupan di dusun sagu fam suaminya, baik bersama keluarga batih maupun keluarga besar dari fam suami.

Cerita di atas juga berarti bahwa hak waris atas dusun sagu diteruskan melalui garis laki-laki (patrilineal). Perempuan masih bisa memperoleh manfaat dari dusun sagu orang tuanya dalam batas-batas tertentu atau sebagaimana disepakati oleh anggota fam dan terutama para tetuanya. Batas ini umumnya sekedar untuk menokok sagu guna memenuhi pangan keluarga atau mengumpulkan sayur, dan hal ini pun dilakukan sebagai opsi kedua saja. Umumnya, perempuan yang sudah menikah akan ikut mencari penghidupan di dusun sagu fam suaminya. Penguasaan dusun sagu oleh laki-laki juga berarti bahwa keputusan-keputusan penting menyangkut sumberdaya berada di tangan laki-laki. Perempuan, baik istri maupun saudara kandung si laki-laki, tidak punya “suara”

20. Pada prinsipnya, setiap orang bisa mengambil ikan di bagian sungai mana pun. Namun, semenjak kegiatan *tokok sagu* dan *mencari* selalu dilakukan di dusun masing-masing fam, biasanya orang mencari ikan juga di wilayah sungai yang dekat dengan dusun mereka.

21. Rupanya hal ini tidak berlaku umum. Pada fam Tebe, misalnya, anak perempuan yang sudah menikah tetap diperkenankan untuk mencari penghidupan di dusun sagu bapaknya.

untuk mengambil keputusan dan hanya “ikut apa kata laki-laki.”²² Tidak heran jika ada ungkapan bahwa anak laki-lakilah yang “jaga dusun.” Hal ini sangat penting untuk diperhatikan ketika klan atau fam berhadapan dengan aktor lain yang berkepentingan atas tanah dan sumberdaya seperti perusahaan, sebagaimana dalam konteks transaksi lahan atau pasokan tual sagu (pada kasus industri sagu).

Suatu pemandangan umum dalam kehidupan sehari-hari orang Kais adalah pembagian kerja berdasarkan gender. Tugas utama laki-laki adalah berburu dan membuat perahu. Mereka juga terlibat dalam tahap-tahap tertentu kerja menokok sagu, mengambil kayu bakar, serta memperbaiki rumah dan membuat atau merawat perkakas kerja. Sedangkan tugas perempuan adalah menokok sagu dan mengumpulkan sayuran. Perempuan juga dibebani tanggung jawab untuk memasak, menyiapkan makanan untuk anggota keluarga, mengurus anak, mencuci pakaian dan piring, serta *mencari* sumber protein di luar ranah perburuan, seperti memancing dan mengambil kerang di sungai. Sebetulnya, jika didaftar, perempuan mempunyai daftar pekerjaan yang lebih panjang ketimbang laki-laki. Itulah sebabnya umpatan yang kerap terlontar dari mulut perempuan yang marah karena lelah bekerja adalah “laki-laki ni hanya tahu bakar uang!” (maksudnya merokok), atau “anak laki-laki ni hanya tahun main saja!” Pola pembagian kerja ini disosialisasikan dan diinternalisasikan oleh orang tua sedari dini kepada anak-anaknya. Memang, anak-anak, setidaknya sejak usia empat tahun, sudah diajak oleh orang tua mereka untuk *mencari* atau menokok sagu ke dusun sagu.

Sejak usia dini pula orang tua menyosialisasikan dan menginternalisasikan pembagian kerja berbasis gender kepada anak-anaknya: tugas utama laki-laki yakni berburu dan membuat perahu, sementara perempuan menokok sagu dan mengumpulkan sayuran.²³ Sebagai contoh, pada suatu waktu saya hendak memotret dua anak kecil bersaudara sepupu, Elon Asikasau (laki-laki, tiga setengah tahun) dan Natalia Tebe (perempuan, empat tahun) ketika ikut keluarga mereka menokok sagu. Elon baru saja dibuatkan mainan perahu oleh bapaknya. Tetapi, ketika saya hendak mengambil gambar, mainan perahu dipegang oleh Natalia. Seketika jua ibunya Elon yang melihat kami menginterupsi, “Natalia, jangan ko pegang itu Elon punya perahu. Elon pegang ko punya perahu. Perempuan itu pegang *nani*, laki-laki baru perahu.” Selanjutnya, gambaran tentang pengorganisasian tenaga kerja serta distribusi hasil kerja akan dipaparkan melalui contoh kerja menokok sagu. Gambaran ini sekaligus berperan sebagai perbandingan dengan industri sagu yang dijalankan Perhutani.

22. Untuk analisis lebih rinci tentang perempuan dan hak atas sagu, lihat artikel Ciptaningrat Larastiti dalam jurnal ini.

23. Sekalipun, di dalam praktik kerja tokok sagu, laki-laki juga terlibat dalam tahap-tahap kerja tertentu.

Ada satu ungkapan orang Kais yang saya pernah dengar, “tidak seperti orang gunung (baca: Maybrat) yang harus tunggu panen dari kebun, kita orang Kais kalau lapar bisa tokok sagu hari ini dan langsung makan hari ini juga.” Suatu ungkapan yang menunjukkan kemurahan hati alam sekaligus gambaran tentang kegiatan produktif yang bersifat “mengambil”. Orang Kais mengenal lima jenis pohon sagu yang digolongkan berdasarkan panjang duri pohonnya. Secara berurutan, pohon dengan duri paling panjang yakni *mugici*, *kororo*, *bitafo*, dan *fiaro*. Satu jenis lainnya, yakni *reimamare*, tidak berduri, dan sering kali juga disebut *sagu nona*. Di antara lima jenis sagu tersebut, jenis *mugici* dan *bitafo* yang paling sering dikonsumsi orang Kais. Menurut mereka, *mugici* adalah jenis yang paling banyak ditemui di hutan. Akan tetapi, *bitafo* dianggap lebih unggul karena kandungan patinya banyak. Oleh karena itu, ia diberi julukan *sagu raja*.

Orang Kais tidak mengorganisir suatu usaha budidaya pohon sagu. Pada dasarnya mereka hanya mengambil pohon sagu yang tumbuh secara alami. Praktik penanaman pohon sagu dilakukan, namun sifatnya terbatas, individual, tidak dilakukan dalam skala luas dengan pengerjaan yang terorganisir. Dengan begitu, orang Kais mengenal dua kategori pohon sagu berdasarkan cara tumbuhnya yang berkaitan dengan soal akses atas pohon sagu. Pertama adalah *sagu alam*, yakni pohon sagu yang tumbuh alami tanpa campur tangan manusia. Sekalipun diakui pohon sagu alam tumbuh tanpa campur tangan manusia, namun orang Kais percaya bahwa sagu alam tumbuh berkat nenek moyang mereka. Berkenaan dengan akses, setiap orang diperkenankan mengambil pohon sagu alam jenis apa saja. Semua orang bisa “makan” dari pohon sagu alam tanpa perlu meminta izin pada seseorang. Bahkan jika ada seseorang menebang pohon sagu alam di dusun sagu milik fam atau keluarga lain satu marga, hal ini tidak menjadi masalah sepanjang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mereka percaya bahwa pohon sagu alam tidak akan habis.

Jenis kedua, *sagu tanam*, adalah pohon sagu yang sengaja ditanam dan diketahui merupakan buah dari usaha penanaman seseorang. Jenis sagu yang ditanam umumnya *bitafo*, *kororo*, *mugici*, dan *reimamare*. Usaha penanaman itu sendiri dilakukan dengan cara mengambil anakan pohon sagu, kemudian ditanam di lokasi tertentu dan dibiarkan tumbuh alami. Pohon sagu tanam umumnya terletak di pinggir sungai yang dekat dengan kampung atau di bagian tepi sungai di dusun sagu. Pada pokoknya, sagu ini ditanam di lokasi yang memudahkan orang untuk menokok sagu. Berkenaan dengan akses, pada pohon sagu tanam melekat

hak milik si penanam. Pohon itu hanya boleh dimanfaatkan oleh si penanam atau keturunan yang ditunjuknya. Pelanggaran atas aturan ini akan menimbulkan masalah. Contohnya, di dusun Yese milik marga Abago terdapat satu pohon sagu yang tumbuh sangat tinggi hasil penanaman *tete* Abraham Abago. *Tete* Abraham sudah lama meninggal dan ia mewariskan pohon sagu *bitafo* tersebut kepada tiga dari sebelas anaknya. Hanya tiga pewaris itu yang mempunyai hak untuk menebang atau memberi izin untuk memanfaatkan pohon sagu tersebut. Orang lain sudah hampir pasti tahu tentang kepemilikan dari pohon sagu itu semenjak orang-orang yang *mencari* ke dusun Yese adalah anggota dari satu fam yang sama.

Dalam percakapan sehari-hari, istilah ‘tokok sagu’ merujuk pada seluruh tahap proses produksi pangan pokok, yakni tepung sagu basah. Akan tetapi, istilah ‘tokok sagu’ itu sendiri sebetulnya secara spesifik merujuk pada proses pengerukan isi batang sagu menggunakan alat yang disebut *nani*, untuk kemudian diolah dan diambil patinya. Proses ini, yang menjadi bagian pokok dalam pembuatan bahan pangan tepung sagu, merupakan bagian kerja kaum perempuan. Oleh karena itu, tokok sagu identik dengan pekerjaan kaum perempuan, meskipun pada keseluruhan tahap produksinya terdapat pula kontribusi tenaga kerja laki-laki. Agar lebih jelas, tabel berikut memberikan gambaran tahap-tahap kerja tokok sagu serta pembagian kerja berdasarkan gender dan generasi.

TABEL 1
Tahap-Tahap Kerja Tokok Sagu berdasarkan Gender dan Generasi

	TEBANG	GULING	RAKIT	HANYUT	KUPAS	TOKOK	REMAS	KEMAS
LAKI-LAKI	V	V	V	V	V	-	-	-
PEREMPUAN	-	V	-	-	V	V	V	V
ANAK-ANAK (LAKI-LAKI & PEREMPUAN)	-	V	-	-	V	V	V	V

Teknologi yang digunakan dalam seluruh tahapan kerja ini masih sangat sederhana. Penebangan pohon secara umum menggunakan kapak, sebagian kecil saja yang sudah menggunakan ‘senso’ (dari kata *chainsaw* atau gergaji mesin). Orang Kais bisa membeli senso berkat penjualan tepung sagu atau kerja upahan di proyek pembangunan pemerintah atau perusahaan. Alat lainnya yakni parang dan linggis untuk membersihkan batang pohon dan mengupas kulitnya yang tebal; peralatan ini juga diperoleh dari pasar. Sedangkan untuk pengemasan, orang dapat menggunakan bekas karung beras berbobot 5 atau 10 kilogram. Di antara semua per-

kakas, hanya dua alat yang dapat dinilai sebagai perkakas “tradisional” yang diproduksi orang Kais sendiri, yakni *nani*, alat pengeuk isi batang sagu yang dibuat dari dua batang kayu yang diikat menyerupai huruf L, serta *womano* dan *goti*, yakni instalasi tempat meremas pati sagu sekaligus untuk mengendapkannya sehingga dapat diperoleh tepung sagu basah. Dua nama terakhir ini dibuat dari bagian pohon sagu itu sendiri, yakni dari pelepah pohon yang cukup tebal dan ditambahkan anyaman daun sagu atau kain dari pakaian sebagai penyaring remasan pati sagu. Alat-alat tradisional ini secara jamak menjadi ranah kerja perempuan, dan memang perempuanlah yang mengambil peran dalam kerja tokok, remas, hingga kemas.

Kerja tokok sagu diorganisir dalam unit-unit keluarga batih. Prinsipnya, setiap keluarga bertanggung jawab memproduksi pangan untuk mereka konsumsi sendiri. Walaupun suatu rumah tangga terdiri atas dua keluarga batih yang menetap di satu rumah, misalnya, setiap keluarga tetap memproduksi tepung sagu sendiri sekalipun dari hasil kerja mereka terdapat bagian yang dikonsumsi bersama-sama. Terkecuali jika terdapat orang tua yang sudah tidak mampu bekerja, maka kebutuhan tepung sagunya akan ditanggung oleh anak yang tinggal bersamanya. Dalam beberapa kasus di mana terdapat kerabat dari salah satu pasangan yang tinggal di dalam satu unit keluarga batih, sepanjang kerabat tersebut terlibat di dalam produksi pangan, maka ia pun akan mendapatkan bagian dari hasil kerjanya.

Seperti tertera pada tabel di atas, sekalipun laki-laki memiliki kontribusi, menokok sagu identik dengan ranah kerja perempuan semenjak proses pokok dari produksi tepung sagu dilakukan oleh perempuan. Bahkan, anak perempuan sedini usia lima tahun pun sudah bisa menokok sagu. Kaum perempuan juga berpartisipasi dalam mengumpulkan sumber protein hewani ketika mereka juga memancing ikan dan udang, mencari *bia* (kerang), dan mengambil ulat sagu, selain mengumpulkan sayur dan jamur. Namun, bisa dikatakan perempuan bersumbangsih dalam mengumpulkan “hewan-hewan kecil” saja, yang diperoleh dari wilayah jelajah mereka, yakni dusun sagu (*tanagobu*) dan sungai di sekitarnya. Sementara itu, peranan laki-laki lebih kentara dalam hal memenuhi kebutuhan protein terutama daging-dagingan. Hanya laki-laki yang pergi ke *tanaobu* (hutan rimba) untuk berburu “hewan-hewan besar”, seperti babi hutan, rusa, kasuari, biawak, tikus hutan, burung, bahkan buaya. Tidak mengherankan apabila pengetahuan tentang batas-batas wilayah tanah ulayat yang mencakup area hutan rimba

cenderung dimiliki dan diwariskan di antara laki-laki semenjak berburu juga berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan tentang isi hutan di antara laki-laki dewasa serta anak remaja mereka yang diajak ikut berburu. Pada satu segi tertentu, berburu juga mengandung konsekuensi sosial yang lebih luas ketimbang menokok sagu, yakni ketika hasil buruan melebihi kecukupan konsumsi keluarga batih, maka kelebihan daging akan dibagikan ke kerabat dan anggota-anggota fam laki-laki. Dengan kata lain, daging merupakan salah satu sarana pertukaran yang berfungsi menguatkan relasi kekerabatan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, produksi tepung sagu basah juga dilakukan untuk tujuan komersial. Perdagangan sagu merupakan sumber pendapatan uang tunai utama orang Kais, di samping kerja upahan pada konteks industri dan proyek pembangunan. Secara siklis, dalam konteks kebutuhan pangan keluarga, kerja tokok sagu akan dilakukan setiap kali simpanan tepung sagu basah akan habis. Meski demikian, intensitas kerja menokok sagu akan ditingkatkan melampaui batas kebutuhan konsumsi pangan keluarga seiring meningkatnya kebutuhan akan uang tunai guna membayar berbagai kebutuhan lain yang tidak diproduksi oleh komunitas. Misalnya, untuk membeli aneka bahan konsumsi harian seperti gula, kopi, teh, bensin, rokok, atau untuk membayar biaya sekolah anak-anak. Selain itu, secara umum usaha produksi tepung sagu basah akan meningkat seturut siklus berikut: setiap awal (masuk sekolah) dan akhir semester (ujian akhir sekolah) serta setiap menjelang perayaan Natal. Dengan kata lain, produksi komoditas tepung sagu basah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana seremonial dan dana reproduksi (Bernstein 2010: 18–20). Selain melalui tepung sagu basah, mereka juga mencari pendapatan tunai dengan menjual hasil pengolahan bahan alam lain seperti dendeng babi, rusa, ikan dan apatar (ulat sagu) *asar* (asap), sarang semut, burung kakatua, kulit buaya, dan madu hutan. Bahan alam yang diperoleh di hutan dan sungai ini umumnya lebih banyak dikumpulkan melalui kerja berburu yang dilakukan laki-laki ketimbang perempuan.

Dengan demikian, tidak mengherankan apabila perempuan menjadi aktor utama dalam perdagangan sagu, meskipun bukan berarti tidak ada laki-laki yang berperan dalam ranah tersebut. Ini berarti bahwa dalam pertukaran komoditas sederhana yang mereka lakoni, produsen sendiri itulah yang juga berperan sebagai pedagang. Perilaku *pengepulan*, yakni ketika satu atau beberapa aktor membeli komoditas dari banyak produsen untuk kemudian

24. Kota Teminabuan menjadi lokasi pertemuan dua komoditas serta orang-orang dua kelompok suku berbeda: orang Maybrat membeli sagu orang-orang pantai (Kais, Saga, Puragi, Bedare, Makaroro), serta dendeng babi atau ikannya, sedangkan orang pantai bisa membeli sayur dan umbi-umbian yang diproduksi orang Maybrat. Ada dua lokasi pasar di sana, yakni pasar sagu Ampera, sebuah pasar terapung yang sepertinya tumbuh secara organik, yang berlokasi dekat pelabuhan yang menjadi titik pertemuan lalu lintas orang-orang pantai. Selain itu ada pasar Kajase, sebuah bangunan pasar permanen yang dibangun oleh pemerintah dan berlokasi dekat dengan terminal kendaraan untuk bertolak ke kampung-kampung Kais Darat. Selain di dua pasar tersebut, ada pasar lain yang lebih kecil namun strategis, yakni pasar Sesna yang terletak di pinggir jalan Teminabuan menuju Maybrat. Pasar ini dekat dengan kompleks kantor bupati dan pasti dilalui orang Maybrat yang akan ‘turun’ ke Teminabuan. Beberapa orang Kais bahkan menjual tepung sagu mereka sendiri langsung ke Maybrat. Ini terutama dilakukan oleh beberapa keluarga yang memiliki kerabat yang tinggal/ menikah dengan orang Maybrat.

25. Rupanya hal ini tidak berlaku umum. Pada fam Tebe, misalnya, anak perempuan yang sudah menikah tetap diperkenankan untuk mencari penghidupan di dusun sagu bapaknya.

ia jual di pasar yang lebih luas, tidak berkembang. Dalam pola pengepulan, produsen tidak terlibat langsung di dalam perdagangan komoditas yang mereka hasilkan, tetapi tidak demikian halnya di Kais. Di samping menjual sendiri komoditas yang mereka produksi, praktik yang umum berlaku adalah titip-jual, yakni menitipkan tepung sagu kepada salah satu produsen-pedagang yang pergi ke pasar Teminabuan²⁴ atau Sesna yang juga menjual tepung sagu hasil produksinya sendiri. Jual beli tepung sagu di kampung biasanya terjadi manakala pembeli dari kampung lain seperti Makaroro, Sumano, dan Benawa datang ke Kampung Kais untuk membeli tepung sagu guna dikonsumsi dan dijual kembali di kampung mereka.²⁵ Sebelum datangnya perusahaan kelapa sawit, orang Kais membawa tepung sagu mereka ke pasar sagu Ampera di Kota Teminabuan atau pasar Sesna di jalan menuju daerah Maybrat. Pembeli sagu Kais yang utama adalah “orang-orang gunung” (Maybrat), penduduk di Teminabuan, serta pedagang orang Bugis. Maka dari itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang Kais merupakan salah satu produsen pangan pokok bagi populasi di wilayah Sorong Selatan, bahkan sampai ke Kabupaten Maybrat.

Industrialisasi Sagu di Papua Barat

Kawasan lahan gambut yang didominasi tutupan pohon sagu alami di wilayah pesisir Sorong Selatan telah mengalami beberapa “tindakan” berbeda dari para pemodal yang datang dari luar. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda mengusahakan budidaya pohon damar untuk diambil getahnya. Pada masa Orde Baru dan transisi Reformasi, pola ekstraktif berlangsung melalui izin konsesi kayu untuk mengambil terutama kayu-kayu berharga seperti pohon besi. Kemudian, pada periode kedua masa pemerintahan Presiden SBY, modus ekstraksi yang lain mulai direncanakan dan akhirnya dapat direalisasikan dalam masa pemerintahan Jokowi melalui skema industri pertanian sagu. Industri sagu dianggap bisa memberikan alternatif lain dalam hal eksploitasi hutan alami Papua, di luar aktivitas industri yang coraknya destruktif seperti konsesi kayu dan perkebunan kelapa sawit. Industri sagu dijalankan tanpa mengubah jenis tanaman alami setempat, melainkan memberi penekanan pada tata kelola organisasi penanaman sekalipun sifat pengorganisasiannya mirip perkebunan. Oleh karena itu, sebagian pakar menilai pengembangan industri sagu sebagai praktik yang potensial dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan (Ehara, Toyoda, dan Johnson 2018).

Ada dua hal yang akan disoroti pada bagian ini. Tidak seperti model ekstraktif konsesi kayu yang mengambil hasil hutan tan-

pa melakukan reorganisasi ruang, model industri sagu dapat dijalankan pertama-tama mesti melalui reorganisasi ruang. Hal ini mencakup pengklasifikasian lahan (dengan batas-batas satuan lahan) serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti sistem kanal²⁶. Dalam hubungannya dengan eksistensi kepengaturan ruang yang telah dibangun dan dijalankan orang Kais selama ratusan atau ribuan tahun sebelumnya, proses industrialisasi sagu dapat diartikan pertama-tama sebagai intervensi kepengaturan ruang baru guna memberi jalan bagi proses akumulasi kapital kemudian. Kedua, kepengaturan yang hendak dipraktikkan ke dalam ruang hidup orang Kais juga mengandaikan (tak terpisah dari) perlunya pengaturan atas populasi setempat guna menyediakan pasokan tenaga kerja untuk moda produksi yang baru.

Pembangunan pabrik tepung sagu di Papua Barat dilatarbelakangi oleh diskursus pembangunan kedaulatan pangan nasional yang diyakini bisa tercapai melalui industrialisasi. Hal ini tercermin dari pernyataan Presiden Jokowi dalam pidatonya saat pembukaan pabrik sagu Perhutani pada 1 Januari 2016, bahwa upaya pemerintah untuk membangun pabrik sagu di Papua ditujukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional (Sutianto 2015). Guna mewujudkannya, pemerintah memberikan mandat kepada salah satu perusahaan negara, yakni Perhutani, untuk melaksanakan industrialisasi sagu di Papua. Meski direalisasikan pada masa pemerintahan Jokowi, usaha ini sebetulnya telah dirintis beberapa tahun sebelumnya pada masa pemerintahan SBY. Mandat industrialisasi sagu diluncurkan dengan terbitnya “Surat Penugasan Pengembangan Industri Sagu di Papua Barat”²⁷ oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat itu dipimpin Dahlan Iskan, dengan Nomor S-90/MBU/2012, tanggal 29 Februari 2012. Di level lokal, penugasan ini ditindaklanjuti dengan izin dari Bupati Sorong Selatan dengan Nomor 522/126/BBS/2012 pada Juni 2012 serta Keputusan Bupati Sorong Selatan tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Nomor 522/223/BSS/XII, tanggal 14 Desember 2012, yang memuat keterangan izin konsesi seluas 16.055 hektare yang berlaku selama 25 tahun. Bagi Perhutani, ini merupakan kali pertama mereka mengelola konsesi hutan yang berada di luar Pulau Jawa.²⁸

Dengan mempertimbangkan upaya industrialisasi yang telah dimulai pada masa Presiden SBY, saya menduga bahwa usaha ini terkait dengan agenda pembangunan nasional saat itu yang dibungkus dalam proyek besar Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 yang diluncurkan pada 2011.²⁹ Dalam skema MP3EI dengan konsep koridor ekonominya, fokus pembangunan sektor pangan merupakan salah

26. Pembangunan kanal sebagai ruas lalu lintas barang berkaitan dengan pengorganisasian penanaman serta panen.

27. Istilah resmi sebagaimana dicatat dalam dokumen sosialisasi AMDAL Perhutani Kais.

28. Wawancara dengan Panca Sihite, General Manager Perhutani Kais (13 Mei 2017).

29. Lihat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025.

satu dari tema pembangunan koridor Papua-Kepulauan Maluku, selain sektor perikanan, energi, dan pertambangan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2011: 156–176). Agenda pembangunan sektor pertanian pangan dimuat dalam megaprojek MIFEE yang dalam praktiknya telah merampas jutaan lahan tempat komunitas Marind Anim menggantungkan hidup untuk diubah menjadi kompleks perkebunan skala besar dengan komoditas pangan dan bioenergi yang dimodali oleh puluhan perusahaan multinasional (Ito, Rachman, dan Savitri 2014). Meskipun pembangunan industri sagu tidak termuat di dalam dokumen resmi MP3EI, kemunculannya berada dalam latar agenda pembangunan sektor pangan tersebut.

Perlu juga diperhatikan bahwa pembangunan industri sagu di Sorong Selatan turut dilegitimasi oleh gagasan-gagasan pejabat publik yang memandang wilayah (dan penduduk) pedalaman sebagai entitas tidak berkembang dan karena itu diperlukan intervensi pembangunan. Seperti sudah ditelaah oleh Li (2002), konstruksi sosial tentang pedalaman sebagai wilayah (dan penduduk) yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi dijadikan landasan bagi pembangunan yang mengambil bentuk pengintegrasian wilayah dan penduduk pedalaman ke dalam aktivitas ekonomi “baru” yang didominasi modal dan berorientasi pasar, sebagaimana dibayangkan dan direncanakan oleh pusat kekuasaan. Pejabat pusat maupun daerah sama-sama menyatakan bahwa sumberdaya alam sagu Papua “belum dimanfaatkan dengan optimal” (*Metrotvnews.com* 14 Oktober 2015a). Pertanyaannya, apa ukuran dari optimal tersebut? Siapa yang mendefinisikan ukuran tersebut dan untuk kepentingan apa? Pandangan yang bias ini secara implisit telah mengeksklusi eksistensi dan kepentingan orang Kais atas sumberdaya alam tempat hidup mereka (bahwa mereka tidak memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal, sekalipun bagi orang Kais aktivitas produksi mereka itu sudah sara diri). Pandangan ini juga menyiratkan bahwa perihal optimal diukur dari titik pandang industri yang berorientasi pada akumulasi, yang tentu kepentingannya berbeda dengan apa telah dijalani orang Kais. Seperti pula tecermin dalam pandangan Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw yang menilai bahwa potensi besar sagu di daerahnya itu “belum terjamah” dan karena itu terbuka bagi investor yang mau memanfaatkan sumberdaya alam tersebut (*Metrotvnews.com* 14 Oktober 2015b).

Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang belum terjamah itu, dari aspek ruang, pembangunan industri sagu pertama-tama mesti dilandasi oleh legalitas dan legitimasi hukum negara terhadap kawasan hutan yang maujud pada aturan Tata Guna

Hutan Kesepakatan (THGK)³⁰. Di atas kertas, THGK merupakan perwujudan dari kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk menentukan ruang kawasan hutan beserta fungsi-fungsinya. Penelitian ini tidak menelusuri apa dan bagaimana populasi setempat di kawasan hutan sagu alami Sorong Selatan dilibatkan dalam proses kesepakatan bersama tersebut untuk menentukan status dan fungsi kawasan hutan. Akan tetapi, dalam hubungannya dengan proses pengaturan ruang ini, saya melihat bahwa pembangunan industri, yang dilandasi dan dilegitimasi dengan pengaturan ruang oleh aktor-aktor negara, dibangun dengan cara mencaplokkan diri pada suatu ruang (kawasan hutan) di mana suatu mekanisme kepengaturan ‘yang lain’ telah eksis sebelumnya, yakni kepengaturan ruang oleh populasi setempat berdasarkan sejarah penguasaan yang didasarkan dan diatur menurut afiliasi keturunan dan relasi kekerabatan. Dua bentuk kepengaturan ruang ini memiliki elemen-elemen berbeda dalam hal pengaturan akses, tata batas, dan tentunya penguasaan. Konsekuensi dari benturan antara dua modus pengaturan ruang ini akan diulas pada bagian selanjutnya.

Sebelum Perhutani memperoleh izin konsesi di kawasan hutan Sorong Selatan, sudah terdapat beberapa perusahaan lain yang memperoleh konsesi dan beberapa di antaranya sudah memulai aktivitas produksi setidaknya sejak sepuluh tahun terakhir. Persis bersebelahan dengan area konsesi Perhutani, terdapat area konsesi PT Austindo Nusantara Jaya yang telah mengoperasikan industri sagu sejak 2007. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia dengan unit bisnis utama komoditas kelapa sawit dan sagu. Persis di sebelah utara dan timur konsesi Perhutani terdapat area konsesi dua anak perusahaan ANJ, yakni PT PPM dan PT PMP. ANJ juga memiliki konsesi industri sagu yang terletak di selatan wilayah konsesi Perhutani, yakni PT ANJAP dan telah beroperasi sejak 2009. Selain kapling area industri sagu dan kelapa sawit, terdapat pula dua pemegang konsesi kayu, yakni PT Wanagalang Utama dan PT Wana Irian Perkasa. Keberadaan para pemegang konsesi ini menunjukkan bahwa kawasan hutan Sorong Selatan telah menjadi lanskap *frontier* dari industri yang ber-corak ekstraktif. Gambarnya dapat dilihat pada Gambar 1.

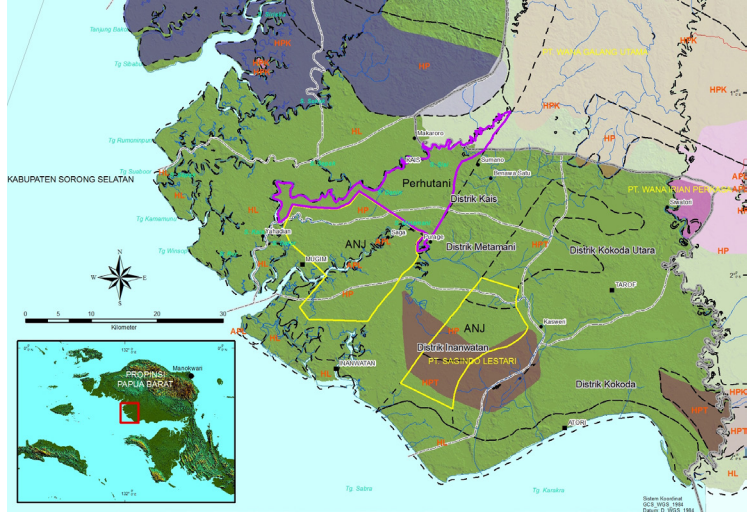
Sekarang mari kita lihat lebih rinci bagaimana pengorganisasian ruang untuk produksi tepung sagu industri direncanakan oleh Perhutani. Menggunakan prinsip kompartemenisasi spasial, total lahan konsesi tidak seluruhnya digunakan sebagai areal penebangan efektif, namun dipilah-pilah berdasarkan fungsi ruang, seperti untuk areal lahan pabrik dan kanal³¹. Dalam dokumen sosialisasi

30. THGK memuat klasifikasi ruang kawasan hutan menurut fungsi-fungsinya. Ada tujuh klasifikasi ruang, yakni Hutan Produksi, Hutan Produksi Tetap, Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Tetap, dan Areal Penggunaan Lain. Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/ Menhut-II/2009.

31. Kanal berfungsi sebagai jalan untuk membawa tual sagu dari dalam hutan keluar ke sungai dan kemudian ditarik rakit ke lokasi pabrik. Selama saya kerja lapangan, proses pembangunan kanal belum dilakukan, namun warga Kais merasa khawatir dan berpandangan pembukaan kanal akan berdampak buruk pada hutan.

GAMBAR 1
Peta Kawasan
Hutan Sorong
Selatan

Sumber:
Bappeda Kabupaten
Sorong Selatan

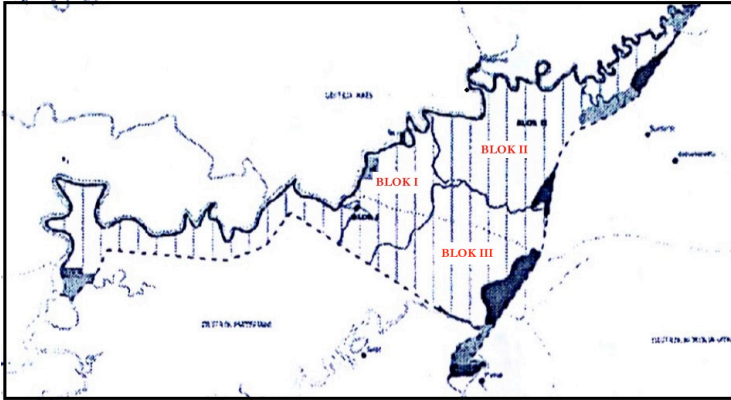


AMDAL pada 2013, Perhutani juga telah mengidentifikasi luas dusun sagu yang terdapat di setiap blok dengan luas total 2.648 hektare. Ini berarti bahwa sedari awal perusahaan telah mengetahui kawasan yang tidak bisa dieksploitasi karena merupakan sumber pangan komunitas setempat. Rincian klasifikasi lahan Perhutani disajikan pada Tabel 2.

TABEL 2
Kategori Lahan
dalam Wilayah
Konsesi Perhutani

KATEGORI LAHAN	BLOK I	BLOK II	BLOK III	TOTAL (DALAM HEKTARE)
Areal penebangan efektif	3.425	3.425	3.425	10.275
Dusun sagu	1.606	940	138	2.648
Total	5.031	4.365	3.563	12.959

Di atas kertas, rencana pengorganisasian produksi akan dilakukan dengan cara penebangan bergiliran pada tiap blok. Misalnya, setelah penebangan pada Blok I selesai (menurut target produksi), penebangan kemudian pindah ke Blok II, kemudian Blok III, dan kembali lagi ke Blok I. Seterusnya demikian. Prinsip penebangan pohon sagu akan memperhatikan stratifikasi batang sagu dalam rumpun. Rumpun-rumpun sagu yang lebat akan dijarangkan dan dilakukan penanaman pada lahan yang kosong. Penebangan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia menggunakan alat tebang (kapak atau gergaji mesin). Setiap batang sagu kemudian dipotong ke dalam ukuran 1,2 meter. Potongan ini, yang disebut tual sagu, kemudian diikat secara berantai dan digulingkan ke ka-



GAMBAR 2
Peta Wilayah
Konsesi Perhutani

Sumber:
Dokumen Sosialisasi
AMDAL Perhutani 2013.

nal-kanal untuk kemudian ditarik menggunakan perahu ke lokasi pabrik. Dalam proyeksi kalkulasi produksi Perhutani, penebangan pohon sagu dilakukan pada satu blok untuk satu tahun dengan rata-rata luas tebang 3.425 hektare ekuivalen dengan 200.000 batang pohon (atau 58 batang per hektare) yang akan menghasilkan 30.000 ton pati sagu per tahunnya, atau setara dengan 150 kilogram tepung sagu per batang.³²

Bagaimana rencana kerja di atas dilaksanakan? Tahap awal dimulai dengan pendekatan secara sosial kepada penduduk di kampung-kampung yang masuk ke dalam wilayah konsesi Perhutani, yakni Kais-Tapuri dan Yahadian (di Distrik Metemani). Dari serangkaian proses pendekatan dan sosialisasi, Perhutani kemudian menginisiasi pembentukan LMDH yang diketuai dan beranggotakan masyarakat kampung. Di Kais-Tapuri, mantan kepala kampung berperan sebagai ketua dengan anggota yang juga sebagian besar merupakan aparat pemerintah/lembaga desa. Berkenaan dengan aktivitas industri, LMDH berperan dalam merekrut pekerja pabrik serta menjadi pintu masuk penjualan tual sagu. Sejak pembangunan pabrik dimulai pada 2015, LMDH telah memfasilitasi perekrutan sekitar lima puluh pekerja dari Kais-Tapuri, kebanyakan adalah orang-orang muda. Mereka dilibatkan sejak proses pembangunan lokasi pabrik, pemasangan instalasi mesin, sampai berjalannya aktivitas produksi. Berkenaan dengan suplai tual sagu, penjualan tual sagu dari kelompok-kelompok pemasok mesti melalui LMDH. Dari harga jual tual sagu yang ditentukan pemerintah kabupaten sebesar Rp9.900 per tual, LMDH mendapatkan komisi sebesar Rp900 sebagai imbal jasa atas peran kelembagaan. Sisanya diterima oleh warga yang menjual tual sagu. Skema ini merupakan cara bagaimana mobilisasi tenaga kerja untuk industri dilakukan dengan memanfaatkan kelompok yang berisi para tetua kampung.

32. Dokumen
Sosialisasi AMDAL
Perhutani 2013.

Meskipun berbeda bentuk, pola ini mirip dengan mobilisasi tenaga kerja melalui tetua fam yang dilakukan perkebunan kelapa sawit.

Pendekatan kultural juga dilakukan Perhutani dalam teknis mobilisasi pasokan tual sagu. Meskipun di atas kertas pasokan tual sagu dilaksanakan melalui peran LMDH, dalam praktiknya pekerja Perhutani non-orang setempatlah, yakni pekerja permanen asal Ambon, serta terutama seorang pekerja asal Papua, Martinus, yang bertugas sebagai garda depan mobilisasi kelompok pemasok tual sagu. Martinus berasal dari Papua tetapi sudah lama menetap di Jawa. Bapaknyanya berasal dari Bintuni dan konon ibunya berasal dari Kais. Entah bagaimana caranya ia bisa bekerja di Perhutani, yang jelas ia punya peran penting dalam melakukan pendekatan ke kepala kampung dan elite LMDH agar bisa mendorong kelompok pemasok tual sagu bekerja sesuai target perusahaan. Di lapangan, ia juga berperan dalam mengoordinir pemasokan tual sagu dari kelompok-kelompok kerja. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa operasi industrial dilaksanakan dengan memanfaatkan aspek kultural, kebiasaan, dan organisasi sosial komunitas setempat dalam hal penerahan tenaga kerja.

Pertautan Moda Produksi, Proses Kerja, dan Konflik

Proses industrialisasi sagu yang berlangsung di Sorong Selatan pertama-tama dipahami sebagai pertemuan dan pertautan antara dua moda produksi yang berbeda. Di satu sisi adalah moda produksi berlandaskan kekerabatan yang dijalankan orang Kais, dan di sisi lain adalah moda produksi kapitalis yang dioperasikan oleh Perhutani. Secara sistemis, dua moda produksi ini bekerja dengan orientasi berbeda: produksi komoditas tepung sagu melalui moda yang pertama ditujukan untuk kecukupan subsistensi komunitas, sedangkan produksi pada moda yang kedua bertujuan untuk mencari laba. Produksi melalui moda yang pertama akan tersalur ke dalam sirkuit pertukaran komoditas sederhana (Komoditas [K] - Uang [U] - Komoditas [K]); sementara pada moda yang kedua produksi dilakukan dalam siklus pertukaran kapitalis (Uang [U] - Komoditas [K] - Uang' [U'])³³. Momentum yang akan disoroti melalui analisis ini adalah ketika salah satu elemen dalam moda produksi pertama, tenaga kerja, mengalami proses komodifikasi, dengan keterlibatannya dalam proses produksi moda yang kedua. Dari sisi pekerja atau aktor pada moda produksi pertama, penjualan tenaga kerjanya (Komoditas) berlangsung dalam kerangka pertukaran komoditas sederhana; dengan imbalan upah yang digunakan untuk membeli komoditas penunjang sarana hidup lainnya. Dari sisi moda produksi yang kedua, pembelian komoditas tenaga kerja di-

33. Untuk ringkasan atas model pertukaran ini, lihat Fine dan Saad-Filho (2010: 27–35).

lakukan untuk memenuhi elemen produksi guna menghasilkan laba (Uang'), yang dalam prosesnya menciptakan nilai lebih untuk diakumulasikan kemudian.

Dalam logika di atas, transformasi dari elemen tenaga kerja pada moda yang pertama untuk terlibat dalam proses produksi pada moda yang kedua diartikan sebagai perubahan dalam hubungan antarmanusia dalam konteks kerja mentransformasi alam, yang pada gilirannya akan mengubah relasi manusia dengan alam itu sendiri. Hal inilah yang akan disoroti dalam proses industrialisasi sagu tahap awal ini, ketika tenaga kerja dari populasi setempat (laki-laki Kais) masuk ke dalam relasi pertukaran pasar sebagai komoditas, yang pada gilirannya menimbulkan konsekuensi atau perubahan dalam cara bagaimana komunitas setempat itu sendiri berelasi dengan alam.

Pertautan antara dua moda produksi itu akan menyoroti aspek intersistemis (moda kapitalis-moda berlandaskan kekerabatan) dan intrasistemis (internal dalam moda berlandaskan kekerabatan) (Wolf 1982: 76). Relasi intersistemis melalui pengambilan tenaga kerja setempat untuk mendukung kinerja produksi kapitalistis berkonsekuensi pada relasi intrasistemis organisasi sosial orang Kais, dalam hal: 1) mobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan industri; 2) konflik horizontal antarfam atau antarkeluarga di dalam satu fam yang disebabkan persoalan tata batas lahan dan akses atas sumberdaya dalam konteks kerja pasokan tual sagu (konflik terkait ruang); 3) situasi kelebihan kerja yang dialami pekerja pabrik sehingga menyebabkan disrupsi terhadap proses reproduksi komunitas (konflik terkait waktu: alokasi tenaga kerja).

1) Konflik Terkait Pengaturan Ruang

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, orang Kais memiliki klasifikasinya sendiri dan tata cara mengatur penguasaan dan akses atas sumberdaya hutan. Hutan terpilah-pilah berdasarkan penguasaan tiap marga dengan batas teritorial yang cair dan bersifat fleksibel. Penanda batas suatu dusun sagu milik satu marga dengan dusun sagu milik marga lain adalah pepohonan, misalnya pohon sagu, kelapa, atau mangga. Anggota marga A tidak masalah jika menebang pohon sagu di wilayah dusun sagu milik marga B sepanjang hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga (nonkomersial), dikomunikasikan (izin) dengan pemilik dusun sagu, dan bukan menebang pohon sagu tanam. Kejadian ini lumrah terjadi apalagi mengingat batas wilayah dusun sagu satu dengan yang lain bukanlah batas *rigid* serupa marka jalan.

Datangnya Perhutani ke Kais membawa dampak perlakuan yang berbeda dari orang Kais atas pohon sagu. Di permukaan, perlakuannya memang sama: pohon sagu dianggap sebagai sumber pangan pokok dan juga uang. Tentu, uang ini dimengerti dalam kerangka pertukaran komoditas secara sederhana: K - U - K. Orang Kais sengaja memproduksi tepung sagu berlebih untuk dijual ke pasar dan dengan demikian uang hasil penjualan tersebut bisa digunakan untuk membeli komoditas lain yang dibutuhkan. Alur ini memang tidak berubah ketika Perhutani datang. Namun berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, orang tidak lagi perlu menokok sagu terlebih dahulu sebelum mereka jual, kini orang cukup menjual batang pohon sagu saja ke pabrik Perhutani untuk memperoleh uang. Artinya, proses industrialisasi sagu membuat orang Kais bisa lebih cepat mendapatkan uang tunai ketimbang sebelumnya. Akan tetapi, situasi yang memunculkan suasana perlombaan untuk memperoleh uang tunai dari menjual tual sagu ini memunculkan masalah baru.

Selama lima bulan saya tinggal di kampung Kais, tercatat ada tiga kali keributan dan cekcok di antara warga kampung berkenaan dengan penebangan pohon sagu untuk dijual ke pabrik. Masalahnya selalu sama: seseorang telah menebang pohon sagu di wilayah dusun sagu milik marga lain. Pada satu kasus keributan ini malah terjadi di antara anggota marga yang sama, misalnya ketika Samuel Abago memprotes kakaknya, Yohanes Abago, karena sang kakak telah menebang pohon sagu di dusun tempat Samuel biasa menebang pohon sagu. Samuel memberikan keterangan bahwa tidak masalah jika seseorang menebang pohon sagu itu untuk makan keluarganya, tetapi jika itu dilakukan untuk memperoleh uang dengan menjual ke pabrik sagu, itu bermasalah. Sama halnya dengan seteru yang muncul pada konteks transaksi lahan antara orang Kais dan orang Awee di perkebunan kelapa sawit ANJ³⁴, masalah terletak pada soal tata batas dan klaim atas lahan yang dalam konsepsi tradisional sifatnya tidak ajek dengan legitimasi yang didasarkan pada pengetahuan lisan turun-temurun. Tata batas dan klaim tradisional ini menjadi perkara ketika masuk dalam konteks komodifikasi lahan yang bekerja dalam sistem bernalar teritorial yang berbeda. Seperti diungkapkan oleh Demianus Abago, tanah kerap kali menjadi sumber permasalahan di Papua ketika izin-izin konsesi perusahaan diberikan, sebab ganti rugi lahan dalam konsesi perusahaan yang didasarkan pada pemetaan modern (melalui Sistem Informasi Geografis) sering kali tidak menangkap konsepsi yang berlaku di masyarakat tentang “tanah bersambung”.³⁵ Hal ini lantas memunculkan konflik horizontal antarmasyarakat yang

34. Dalam kasus perkebunan kelapa sawit ANJ, fam Kaitao (orang Kais) menuntut perusahaan membayar “uang pintu masuk” karena ANJ hanya membayar ganti rugi pada orang Awee, padahal terdapat tanah ulayat orang Kaitao yang berbatasan dengan tanah ulayat Awee yang juga tercakup ke dalam konsesi perusahaan (Catatan Lapangan Carolina Astri, 2016).

35. Diskusi Visser (2001) tentang konstruksi desa di Papua yang tidak bisa disamakan dengan konsep desa di Jawa yang mana satuan permukiman penduduk terikat dengan relasi tenurial berguna dalam menerangkan kasus ini. Pada dasarnya, teritorial suatu kampung di Papua tidak berarti bahwa tanah milik penduduknya berada dalam teritori tersebut. Tanah suatu fam yang penduduknya teregistrasi di suatu kampung bisa jadi terletak di teritori administrasi kampung lain, seperti contoh fam Kaitao di atas. Sangat penting untuk memperhatikan sejarah penguasaan lahan tiap klan yang terkait dengan riwayat migrasi, yang diiringi afiliasi dan perpecahan antara atau sesama kelompok, sebelum periode sedentarisasi.

tanahnya saling berbatasan. Apalagi dalam konteks ini terdapat urusan transaksi komersial dalam bentuk pembayaran “uang pintu masuk” dari perusahaan kepada pemilik ulayat.

Hal lain yang lebih mengkhawatirkan dari “mendekatnya sumber uang tunai” (perusahaan) adalah: ketika Perhutani menetapkan target produksi yang kemudian diusahakan pada warga agar mereka dapat memenuhi target tersebut, yang berarti meningkatkan intensitas penebangan hutan sagu, kebanyakan keluarga berupaya memenuhi permintaan tersebut dengan menebang pohon dari dusun sagu mereka, yang notabene merupakan tempat orang Kais mencari makan. Markus Nipai, salah satu warga yang menolak untuk menjual tual sagu menyampaikan kekhawatirannya jika pohon sagu di dusun sagu akan lebih cepat habis karena dijual ke pabrik sagu. Di tingkat komunitas pun, dalam seri diskusi kelompok terarah,³⁶ warga terpilah ke dalam dua kubu. Mereka yang getol menjual tual sagu ke pabrik beralasan bahwa pohon sagu di hutan tidak akan bisa habis saking berlimpahnya. Mereka juga berargumentasi bahwa mereka menebang pohon sagu yang hampir tua saja, bukan pohon sagu muda yang masih dalam perjalanan mencapai masa matang. Sedangkan kubu lain khawatir bahwa penebangan pohon sagu di dusun sagu yang tidak terkendali lambat laun akan mengancam sumber pangan komunitas.

Satu alasan mengapa orang-orang menebangi pohon sagu dari dusun sagu yakni karena persoalan akses untuk pemasokan tual sagu. Penebangan pohon sagu dari dalam hutan hampir mustahil dilakukan sebab pohon sagu sangat sulit untuk ditarik ke pinggir sungai. Amatlah berat bagi kelompok pekerja pasokan tual untuk membuat jalan sendiri guna menggulingkan tual sagu dari hutan bagian dalam. Di antara warga beredar rumor yang menyebutkan bahwa salah satu kesepakatan dari sosialisasi AMDAL dengan Perhutani adalah tual sagu yang dipasok ke pabrik mesti berasal dari wilayah hutan, bukan dusun sagu, kira-kira setelah 500 meter masuk ke dalam dari pinggir sungai. Kondisinya, hampir semua dusun-dusun sagu terletak di pinggir atau dekat badan sungai agar mudah dijangkau orang. Perlu diperhatikan bahwa medan hutan di Sorong Selatan adalah lahan gambut basah dengan kedalaman sekitar 1 meter. Orang perlu menapaki akar-akar pepohonan atau menjatuhkan batang pohon atau kulit batang sagu untuk dijadikan pijakan berjalan. Sampai penelitian lapangan ini usai, Perhutani belum membangun kanal yang konon dapat menjangkau bagian dalam hutan guna menjadi jalan bagi transportasi tual sagu. Tanpa ada infrastruktur jalan atau kanal, hampir mustahil untuk mengambil pohon sagu dari dalam hutan.

36. Diskusi kelompok terarah pertama dengan peserta pemuda dan pekerja perusahaan dilakukan pada 28 Maret 2017. Diskusi kedua dengan peserta perempuan dilakukan pada 3 April 2017. Diskusi ketiga dengan peserta laki-laki dewasa dan orang tua yang tidak bekerja di perusahaan dilakukan pada 23 Juni 2017. Saya berterima kasih kepada Hermitianta Prasetya, rekan tim kerja lapangan, atas kerjasamanya dalam mengorganisir diskusi kelompok dan keseluruhan periode kerja lapangan.

Oleh karena tidak tersedia infrastruktur kanal yang memungkinkan orang mengambil pohon sagu dari “dalam” hutan, maka cara paling mudah dan cepat yakni dengan menebangi pohon sagu yang berlokasi relatif dekat dengan badan sungai, dan ini berarti hampir seluruh lokasi tersebut merupakan dusun sagu. Termasuk pada kawasan—dengan mempertimbangkan status hukum kawasan hutan—Hutan Lindung. Menurut aturan yang telah ditetapkan negara, melalui Kementerian Kehutanan, wilayah operasi Perhutani yakni sebatas pada areal konsesi yang termasuk pada kawasan Hutan Produksi Tetap. Kenyataannya, melihat berbagai kondisi yang meliputi proses pasokan tual sagu, setidaknya selama dua tahun orang-orang telah memasok tual sagu yang berasal dari wilayah Hutan Lindung. Hal ini dilakukan berdasarkan alasan sederhana bahwa dalam sudut pandang orang Kais, wilayah itu merupakan dusun sagu milik “marga” mereka sehingga merupakan hak mereka pula untuk mengambil sumberdaya yang ada di kawasan dusun sagunya.

Sebelum ada pabrik sagu, apropriasi sumberdaya dari dusun sagu yang termasuk ke dalam kawasan Hutan Lindung dilakukan dalam batas subsistensi kelompok. Jika pun memproduksi lebih, hasilnya untuk dijual ke pasar Teminabuan guna ditukar dengan komoditas (kebutuhan) lain. Tidak ada “desakan pasar” yang membuat mereka mesti meningkatkan derajat apropriasi. Keberadaan pabrik sagu, dengan tuntutan target produksi, yang dalam konteks pertukaran berarti meningkatkan permintaan atas tual sagu, mendorong orang Kais untuk meningkatkan laju apropriasi atas sumberdaya alam mereka guna memenuhi permintaan pasar ini. Jadi, munculnya permintaan pasar “baru” akibat tuntutan target produksi dari pabrik sagu, tidak hanya membuat dusun sagu sebagai sumber pangan warga terancam, tetapi juga melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh negara, dengan mengambil sumberdaya hutan di kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan produksi (komersial dan industri).

2) Proses Kerja dalam Kerja Pasokan Tual Sagu

Keberadaan Perhutani, pada satu sisi, memunculkan kesempatan kerja baru bagi orang Kais dalam bentuk kerja untuk memasok tual sagu dan kerja di pabrik dalam pemrosesan tepung sagu. Dua pekerjaan ini diorganisasikan secara berbeda, berkenaan dengan sifat dari tiap jenis pekerjaannya. Dalam kerja memasok tual sagu, pengorganisasian dan mobilisasi tenaga kerja dilakukan melalui relasi kekerabatan. Tiap-tiap regu pemasok tual sagu merupakan unit kerja yang diorganisir lewat relasi kekerabatan. Tetapi pengorganisa-

sian unit kerja ini berbeda dengan pengorganisasian kerja tokok sagu. Dalam kerja tokok sagu, seperti sudah dideskripsikan pada bagian sebelumnya, unit kerjanya adalah keluarga batih. Sedangkan dalam kerja memasok tual sagu, unit kerja terdiri atas individu-individu anggota keluarga besar (*extended family*).

Sebagai gambaran, pada satu waktu saya ikut dalam kerja suplai tual sagu di dusun milik marga Tebe.³⁷ Unit kerja terdiri atas sepuluh orang tenaga kerja: Simson Tebe (suami) - Debora Koire (istri) - Mikel Koire (ipar Simson), Yonatan Asikasau (suami) - Martina Tebe (istri), Natan Tebe (adik Simson), Yoselin Tebe (istri, tante Simson) - Yunus Abago (suami), Daniel dan Yosep Saimar (ipar Simson). Ada tiga keluarga batih dalam regu kerja ini, beserta kerabat mereka. Dalam dua hari kerja, mereka memperoleh 105 tual sagu, namun 30 tual hanyut karena air pasang, sehingga tersisa 85 tual sagu yang keesokan harinya dibawa ke pabrik dan menghasilkan uang sebesar Rp841.500. Hasil ini dibagi rata, dan setiap orang mendapatkan Rp84.150,³⁸ meskipun pada praktiknya, terdapat bagian untuk anggota fam tertua (orang tua Simson Tebe bersaudara) yang tidak mencurahkan tenaga kerjanya. Dengan mempertimbangkan panjang jam kerja selama sekitar sembilan belas jam (dibagi ke dalam tiga hari) serta harga jual barang-barang kebutuhan hidup yang dua kali lipat harga di Jawa, tingkat perolehan upah tersebut dapat dikatakan rendah.

Pada kerja suplai tual sagu, pertautan moda produksi mengemuka dalam momen ketika unit pekerja diorganisir melalui relasi kekerabatan untuk melakukan operasi kerja dalam kerangka aktivitas produksi kapitalis. Skema yang berlaku bagi unit pekerja tual sagu ini adalah pertukaran komoditas sederhana: K - U - K. Mereka menjual tual sagu, yang diperoleh dari kerja mereka, untuk memperoleh uang. Tetapi di sisi Perhutani, pertukaran (jual beli) tual sagu berlangsung dalam skema U - K - U'. Perhutani dengan modalnya, yakni pada tahap U - K, membeli komoditas berupa tual sagu. Namun jika dicermati lagi, uang yang dikeluarkan Perhutani untuk membeli tual sagu sebetulnya adalah harga yang dibayar untuk kerja orang Kais dalam mengapropriasi sumberdaya alam (pohon sagu)—dengan kata lain, upah bagi tenaga kerja pemasok tual sagu. Ini bisa diartikan bahwa perusahaan membayar upah kerja melalui barang yang dihasilkan pekerja.

Sebagai yang diungkapkan General Manager Perhutani Kais³⁹, secara tersurat orang Kais lebih berdaulat ketimbang perusahaan, sebab pasokan bahan baku pabrik bergantung pada kesediaan orang Kais untuk bekerja memasok tual sagu. Andai kata orang Kais tidak berkenan memasok tual sagu, pabrik bisa berhenti beroperasi

37. Kerja pasokan tual sagu pada 25 Februari 2017 di dusun Mugarai.

38. Nilai penjualan tual sagu yang sebetulnya upah kerja ini sedikit lebih rendah dari tingkat upah pekerja pabrik sebesar Rp2.400.000 atau setara dengan Rp96.000 per hari (dengan 25 hari waktu kerja per bulan).

39. Wawancara dengan Panca Sihite, General Manager Perhutani Kais (13 Mei 2017).

si. Satu-satunya hal yang mendorong orang Kais untuk memasok tual sagu yakni kebutuhan mereka akan uang tunai. Lantas, jenis kebutuhan apa yang membuat mereka memerlukan uang tunai, semenjak bahan pangan dan papan semua sudah tersedia secara gratis di hutan? Berdasarkan informasi lisan dan pengamatan sehari-hari, diketahui bahwa pengeluaran yang membutuhkan dana tunai paling besar bagi orang Kais yakni pendidikan (sekolah anak) dan ritual keagamaan (perayaan Natal). Di samping itu terdapat pengeluaran untuk konsumsi harian yakni membeli bensin (untuk bahan bakar mesin perahu), rokok, kopi, teh, gula, minyak goreng, dan jajan anak-anak. Pada pengeluaran pendidikan, setiap tahun, untuk ujian akhir sekolah anak SD, orang tua sekurangnya perlu menyiapkan dana Rp1.000.000 (untuk dua semester). Dana pendidikan akan lebih besar lagi bagi anak yang sekolah SMP dan SMA, apalagi jika mereka sekolah di Kota Teminabuan.

Hal yang membedakan antara penjualan suplai tual sagu dan penjualan tepung sagu tradisional yakni bahwa pada hal yang kedua tidak ada aktor lain yang berperan dalam melangsungkan pertukaran kapitalis (U - K - U') terkait aktivitas produksi tepung sagu. Ketika orang Kais menjual tepung sagu di pasar Teminabuan, pembeli mereka adalah unit-unit yang juga menjalani relasi pertukaran sederhana. Misalnya, salah satu konsumen di pasar ini adalah para pekerja pemerintahan (kebanyakan orang Maybrat). Mereka menukarkan uangnya untuk memperoleh komoditas (tepung sagu) bagi pangan rumah tangga mereka; alias menjalani tahap U - K dari rangkaian K - U - K. Sebab mereka menjual tenaga kerjanya (K) terlebih dahulu untuk memperoleh upah (U), untuk kemudian dibelikan, di antaranya, bahan pangan.

Kategori konsumen lainnya adalah pedagang. Bisa saja dianggap bahwa pedagang membeli tepung sagu orang Kais dalam skema U - K - U'. Mereka mengawali dengan modal (uang) untuk dibelikan barang, lalu barang itu dijual lagi di tempat lain dengan harga lebih tinggi. Tetapi U' yang mereka peroleh berbeda dari apa yang diperoleh Perhutani, sebab pedagang tidak melakukan kegiatan produktif (yang dari situ diciptakan nilai), selain hanya menjual kembali barang dengan harga lebih tinggi dari pembelian. Dengan kata lain, pedagang bukanlah aktor yang melaksanakan kapitalisme-dalam-produksi.

Sementara Perhutani, secara teori memperoleh U' melalui satu proses produksi (dengan menciptakan nilai dan nilai lebih), selain dari laba penjualan produksi akhir. Berbeda dengan unit produksi kapitalis seperti Perhutani, peranan pedagang tidak memunculkan suatu desakan (permintaan) pasar yang muncul sebagai akibat

dari proses produksi sebagaimana terjadi dalam hal keberadaan Perhutani. Permintaan Perhutani terhadap tual sagu didorong oleh kebutuhan produksi, sesuatu yang tidak terdapat pada pedagang karena ia tidak melakukan kegiatan produktif selain sebagai perantara pertukaran komoditas semata.

Dengan demikian, kerja suplai tual sagu, meskipun sepintas dilihat mirip seperti penjualan tepung sagu tradisional—dengan catatan, sekalipun dalam suplai tual sagu orang tak perlu menokok terlebih dahulu, mempunyai implikasi berbeda sebab kerja suplai tual sagu telah memperkenalkan dan melibatkan orang Kais ke dalam suatu relasi produksi yang baru ketika mereka masuk sebagai bagian, unit, dari proses produksi kapitalistis. Hal ini tidak terdapat pada rangkaian pertukaran komoditas sederhana yang mewujud dalam perniagaan tepung sagu tradisional.

Konsekuensinya, dalam pengandaian yang ekstrem, jika semua orang Kais bekerja sebagai pemasok tual sagu dan mereka bekerja setiap hari guna menyelaraskan diri dengan irama target produksi pabrik, konsekuensi yang mungkin muncul adalah: 1) semua orang Kais akan memegang uang lebih banyak dari sebelumnya sebab saban hari mereka menjual tual sagu; 2) tetapi di sisi lain, orang Kais kehilangan waktu untuk *mencari* dan menokok sagu, dua aktivitas subsisten bagi reproduksi kelompok orang Kais; 3) atau bisa jadi mereka tidak lagi bisa menokok sagu karena pohon-pohon sagu di dusun sagu telah habis untuk dipasok ke pabrik sagu; 4) karena tidak lagi mencari dan menokok, alias tidak lagi memproduksi makanan pokok mereka sendiri, orang Kais memperoleh pangan dari membeli, menggunakan uang hasil penjualan tual sagu; 5) di titik ini pasar dapat mengambil peran lebih dalam bagi kehidupan orang Kais dan sekaligus meningkatkan derajat ketergantungan mereka pada uang dan pasar, dengan kata lain terjadi komodifikasi subsistensi (Bernstein 2010: 55, 65); pertanyaannya, apakah pasar dalam konteks Kais dapat memenuhi pasokan pangan yang setimpal dengan apa yang biasa diperoleh dari menokok sagu dan *mencari*?

Sulit untuk membayangkan hal yang disebut terakhir terjadi dalam situasi Kais saat ini, sebab: a) hampir tidak ada orang Kais yang memperjual-belikan tepung sagu di antara komunitas mereka sendiri, semenjak tiap keluarga batih adalah produsen tepung sagu, dan di sisi lain orang Kais sendiri berperan sebagai salah satu komunitas produsen tepung sagu bagi kawasan Sorong Selatan; b) pasar penyedia pangan pokok di Kais sangat terbatas. Hanya ada dua rumah tangga yang secara reguler menjual dendeng babi dan rusa di Kais-Tapuri. Di luar ini, pangan pokok hanya dapat dibeli dari pedagang warung (hanya ada dua warung di

Kais-Tapuri) dan *jolor*. Itu pun pangan yang mereka jual adalah beras, dengan tambahan tepung terigu, mi instan, telur, dan ikan sarden. Jenis pangan ini, meskipun di sini tidak bisa ditunjukkan perbedaan nutrisinya secara tepat, dapat diperkirakan tidak akan bisa menyaingi kandungan nutrisi yang terdapat dalam pangan tradisional orang Kais yang diperoleh dari hutan dan sungai (sagu, berbagai jenis ikan sungai [di antaranya sembilang, gabus], kerang-kerangan, udang, ulat sagu, babi, rusa, biawak, buaya, tikus hutan, jamur hutan, kangkung, daun kasbi). Selain itu, cara memperoleh pangan tersebut mempunyai perbedaan utama: yang satu membeli dengan uang, yang lain mengambil dari hutan dan sungai.

3) Proses Kerja dalam Kerja Pabrik dan Konflik yang Ditimbulkannya

Keberadaan pabrik sagu tidak lantas meniadakan pekerjaan dan sumber pendapatan yang sudah ada sebelumnya. Meskipun wilayah hutan orang Kais secara legal telah diserahkan kepada Perhutani dalam bentuk konsesi HPH, namun pada kasus ini tidak terjadi proses akumulasi primitif melalui perampasan lahan yang memisahkan produsen langsung dengan sarana produksinya sehingga populasi setempat tidak memiliki apa-apa lagi selain tenaga kerja untuk dijual (proletarisasi).

Bagi Perhutani, selain untuk membeli tual sagu, kapital mereka juga digunakan untuk membeli tenaga kerja dari populasi setempat guna dipekerjakan di pabrik sagu. Pembelian tenaga kerja laki-laki dewasa Kais ini telah dilakukan sejak proses pembangunan lokasi pabrik sampai saat ini pabrik memasuki masa uji coba tahun kedua (2017). Sekitar 50 laki-laki dewasa Kais bekerja di pabrik sagu. Menurut manajer, jumlah ini terlampau besar mengingat pabrik masih dalam tahap uji coba. Idealnya 25 pekerja sudah cukup. Akan tetapi, LMDH Bosiro yang dibentuk guna menjembatani masyarakat dan perusahaan sudah sedari awal memasukkan sejumlah 50 pekerja untuk bekerja di pabrik. Pabrik sendiri belum berani mengurangi jumlah pekerja tersebut karena khawatir akan muncul protes dari warga.

Para pekerja ditempatkan pada sepuluh lini produksi, mulai dari pengumpulan tual sagu untuk masuk ke dalam pengolahan mesin, hingga pengolahan air limbah dan pengepakan tepung sagu (kering). Mereka bekerja enam hari dalam sepekan, Senin hingga Sabtu, dengan sehari libur, pada hari Minggu. Dalam satu hari, sejak Senin hingga Jumat, mereka bekerja selama sembilan jam, mu-

lai jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Sedangkan pada hari Sabtu, waktu kerja setengah hari selama lima jam, sejak jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Belum ada pembagian sif pagi dan malam dalam organisasi kerja pabrik, karena mesin masih dalam tahap uji coba. Di samping itu, pasokan tual sagu juga belum bisa mencapai target produksi sebesar 6.000 tual per hari. Para pekerja pabrik menyandang status Buruh Harian Lepas dengan upah sesuai Upah Minimum Regional sebesar Rp2.400.000 per bulan. Tidak ada tunjangan lain di luar gaji ini, tetapi perusahaan memberikan tempat tinggal (rumah) di lokasi pabrik, serta fasilitas kesehatan.

Dari sisi orang Kais, keterlibatan dalam aktivitas produksi di pabrik ini bukan didorong oleh tidak adanya sarana produksi. Sebagian besar pekerja merupakan anggota fam yang bisa mengakses dusun sagu. Meski demikian, dilihat dari aspek usia, sebagian besar pekerja bisa digolongkan sebagai “orang muda” sekalipun mereka semua sudah berkeluarga, dengan rentang usia 25–40 tahun. Hanya sekitar sepuluh sampai dua puluh pekerja yang usianya di atas 40-an tahun. Para pekerja yang relatif berusia muda ini sebagian memiliki riwayat bekerja pada aktivitas produksi nontradisional, seperti bengkel penggergajian kayu (*sawmill*), perkebunan kelapa sawit ANJ, dan pabrik sagu Perhutani. Dengan demikian, di satu sisi kita dapat melihat bahwa kategori sosial orang Kais yang bekerja di pabrik mencerminkan aspirasi golongan muda yang barangkali kurang terikat pada aktivitas produksi tradisional, atau yang melihat bahwa bekerja pada perusahaan dianggap lebih sesuai dengan perkembangan zaman ketimbang hanya *mencari* di hutan. Aspirasi ini dapat dilihat dalam diskusi kelompok terarah yang digelar untuk mengetahui persepsi laki-laki Kais terhadap kondisi komunitas mereka di masa lalu, masa kini, dan visi di masa depan. Sebagian besar peserta yang berusia muda, dan kebanyakan adalah pekerja di pabrik sagu atau perkebunan kelapa sawit, telah menganggap uang sebagai hal penting bagi kehidupan mereka untuk saat ini maupun di masa depan.⁴⁰ Ini berbeda sekali dengan aspirasi generasi di atas mereka yang melihat bahwa menjaga hutan itu lebih penting untuk saat ini dan bagi masa depan ketimbang bekerja mencari uang.⁴¹

Dari aspek generasi, perlu dilihat pula konteks waktu meningkatnya intensitas aktivitas produksi industrial di Kais. Ketika intensitas ini meningkat dan perlu menyerap tenaga kerja setempat, maka penduduk usia mudalah yang cenderung masuk ke dalam aktivitas tersebut. Keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi “baru” telah mengikis keterlibatannya di dalam ekonomi tradisional. Maka tidak heran jika antusiasme dan aspirasi mereka terhadap relasi kerja upahan lebih kuat ketimbang generasi sebelumnya.

40. Diskusi kelompok terarah dilaksanakan pada 28 Maret 2017.

41. Diskusi kelompok terarah dilaksanakan pada 23 Juni 2017.

Meski demikian, satu fakta penting yang tak terhindarkan ketika laki-laki Kais bekerja di pabrik yakni mereka kehilangan waktu untuk *mencari* (berburu, menangkap ikan). Pasalnya, dalam aktivitas produksi tradisional orang Kais, *mencari* merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan protein hewani rumah tangga. Ada dua dampak dari hilangnya waktu untuk *mencari*. Pertama, pasokan protein hewani untuk diet harian anggota keluarga batih berkurang drastis. Sebagai contoh, pada dua pekan pertama saya tinggal di rumah keluarga Antonius Abago (40-an tahun, kepala keluarga dengan anggota seorang istri, tiga anak perempuan, dan satu anak laki-laki), pasokan protein hewani relatif melimpah. Untuk makan siang dan makan malam, sumber protein hewani yang tersedia di piring beragam (tergantung hasil tangkapan/buruan pada hari itu). Satu keluarga bisa makan papeda dengan lauk udang, ikan sembilang, ikan gabus, ulat sagu, dan daging babi (kadang-kadang). Ditambah sayur daun kangkung, jamur hutan, dan daun ubi yang dikumpulkan oleh ibu dan anak-anak perempuan. Begitu Antonius bekerja di pabrik, menu lauk dalam diet harian berkurang drastis, terutama untuk ikan dan daging. Bahkan ketika tangkapan udang hanya sedikit, tak jarang dalam beberapa hari mereka hanya makan papeda dengan sayur dan jamur hutan. Anak-anak pun mengeluh. Dalam situasi ini, Antonius, seperti pekerja pabrik lainnya, kemudian meluangkan waktu pada malam hari untuk *mencari*.

Inilah dampak kedua, ketika para pekerja kemudian mengalami kerja berlebih. Biasanya, Antonius dan rekan pekerja lain mulai *mencari* di atas jam 8 malam hingga sekitar jam 11 jelang tengah malam. Aktivitas *mencari* yang paling mungkin dilakukan di malam hari adalah menangkap ikan, dengan menjaring, sembari mengail udang. Atau, seperti dilakukan Eben Abago (45-an tahun), *mencari* hewan buruan di dalam hutan dilakukan pada hari Sabtu selepas jam kerja pabrik. Dengan demikian, kehadiran Perhutani dan keterlibatan laki-laki Kais dalam kerja pabrik telah menjebak mereka ke dalam beban kerja berlebih. Pada satu momentum mereka terikat dalam relasi kerja upahan dengan lima puluh jam kerja per pekan dalam kerangka produksi kapital. Pada momentum lain mereka tetap terikat pada kewajiban pembagian kerja komunitas sebagai penyedia sumber protein hewani, yang bisa dilaksanakan seusai jam kerja pabrik. Selama penelitian lapangan, kami belum bisa mengukur secara presisi dampak beban kerja berlebih ini bagi laki-laki Kais. Meski demikian, keluhan atas tubuh yang kelelahan kemudian menjadi hal yang lumrah diungkapkan baik itu di rumah ataupun ketika berkumpul dengan tetangga saat santai. Saya ju-

ga belum bisa mengukur secara persis dampak dari berkurangnya pasokan protein bagi anggota keluarga terutama anak-anak. Namun yang jelas, kekhawatiran akan ketersediaan makanan yang cukup untuk keluarga menjadi hal yang dikhawatirkan laki-laki Kais. Seperti diungkapkan Anton Taune (35-an tahun), salah satu pekerja pabrik: “kami di pabrik bisa makan enak, tapi bagaimana dengan anak-anak di rumah.”

Kehadiran aktivitas produksi kapitalis bisa dipandang sebagai gangguan bagi proses reproduksi komunitas setempat ketika tenaga kerja (laki-laki) untuk proses produksi tradisional yang berorientasi subsisten ditarik ke dalam sirkuit akumulasi kapital.⁴² Bagi laki-laki Kais, dampaknya adalah munculnya situasi kerja berlebih semenjak mereka tetap menyanggah tugas dalam pembagian kerja tradisional sebagai pemasok sumber protein hewani untuk diet harian keluarga. Dengan berkurangnya kontribusi kerja laki-laki Kais dalam reproduksi komunitas, jika situasi ini berlangsung dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin timbul dampak lain berupa situasi malnutrisi akibat minimnya pasokan protein hewani, terutama bagi keluarga-keluarga pekerja. Seperti sudah disinggung sebelumnya, sekalipun kemudian laki-laki Kais bisa memperoleh uang tunai lebih besar ketimbang sebelumnya, situasi pasar yang menjual bahan pangan di Kais sangat tidak memadai dalam aspek pemenuhan nutrisi. Bagaimanapun nutrisi yang dikandung oleh daging babi, rusa, ikan-ikanan, udang, kerang, dan hewan buruan lain tidak bisa dipenuhi secara sepadan oleh telur ayam dan ikan sarden yang dijual di warung dan *jolor*. Ketika momen turun gaji tiba, sontak warung dan *jolor* begitu ramai dengan anak-anak maupun orang dewasa yang belanja berbagai jenis barang, mulai dari beras, minyak, hingga pemutar musik-pengeras suara dan mainan anak. Daya beli orang-orang memang meningkat, namun ini tidak berarti bahwa apa yang mereka beli adalah sesuatu yang betul-betul dibutuhkan atau dapat menggantikan hal-hal pokok bagi subsistensi yang sebetulnya bisa diperoleh di hutan dan sungai dengan kualitas yang lebih baik.

Kesimpulan dan Refleksi

Seperti dicatat oleh Resosudarmo *et al.* (2015), pembangunan sektor pertanian penting untuk meningkatkan keuntungan ekonomi bagi orang Papua di pedesaan. Pertanyaannya kemudian, pembangunan sektor pertanian seperti apa dan bagaimana yang dengan tepat bisa menempatkan penduduk pedesaan Papua sebagai penerima

42. Lihat juga tulisan Ciptaningrat Larastiti dalam jurnal ini.

manfaat utama dari pembangunan tersebut? Jika kita menempatkan industrialisasi sagu sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian, analisis atas kasus pembangunan industri sagu di Papua Barat yang menempatkan orang Kais sebagai tenaga kerja tampaknya belum menunjukkan kecenderungan pada arah perbaikan ekonomi mereka. Meningkatnya pemasukan uang tunai melalui relasi kerja upahan tidak dapat dijadikan ukuran untuk mengatakan bahwa perekonomian setempat telah berkembang lebih baik. Tidaklah tepat untuk menempatkan ukuran pendapatan uang tunai semata untuk mengatakan suatu perbaikan ekonomi, manakala aspek-aspek lain yang punya peranan elementer dalam aktivitas produksi subsisten setempat mengalami gangguan. Terdapat kecenderungan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses industrialisasi sagu malah membuka ancaman bagi daya dukung lingkungan, seperti dalam kasus peningkatan eksploitasi dusun sagu. Ditinjau dari kepentingan industri, meningkatnya intensitas apropriasi dusun sagu memang tidak punya dampak negatif bagi operasi produksi pabrik sepanjang pasokan tual sagu berjalan lancar dan bisa mengejar target produksi. Namun dari sisi masyarakat, hal tersebut jelas memunculkan ancaman tidak hanya bagi ketahanan tetapi juga bagi kedaulatan pangan mereka, selain juga menimbulkan disrupsi dalam relasi sosial komunitas.

Disrupsi ini timbul manakala tuntutan-tuntutan kepengaturan dalam produksi industrial mendesakkan kepentingannya pada mekanisme pengaturan akses atas sumberdaya komunitas sehingga tuntutan-tuntutan sistem yang pertama bertubrukan dengan batas-batas yang selama ini bekerja dalam mengatur akses dan hak orang-orang atas sumberdaya alam. Disrupsi juga muncul ketika tuntutan operasi produksi kapitalis mengambil tenaga kerja setempat sehingga mekanisme produksi sara diri yang menjamin reproduksi komunitas terganggu manakala waktu kerja laki-laki dewasa Kais dicurahkan untuk proses produksi kapitalis ketimbang produksi subsistensi tradisional. Pada gilirannya, hal ini mereorganisasi pembagian kerja berdasarkan gender di dalam komunitas Kais sendiri. Lebih dari itu, imbalan dari keterlibatan mereka, dalam bentuk uang tunai, tidak selalu bisa menjamin kualitas dari pemenuhan kebutuhan reproduksi komunitas. Retorika ketahanan pangan yang dijadikan jargon bagi promosi industri ini perlu ditinjau ulang manakala dengan begitu jelas justru sajian protein di dalam diet harian orang Kais (sebagai penduduk setempat) menyusut seketika semenjak para pemasok sumber protein (daging) ditarik masuk ke dalam sirkuit produksi nilai lebih.

Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, ketahanan pangan itu untuk siapa? Semenjak operasi industrial *dimiliki* oleh perusahaan negara yang melangsungkan kegiatan produksinya untuk laba, dan populasi setempat diserap untuk masuk sebagai salah satu “faktor” produksi saja (tenaga kerja) dengan imbalan upah minimum regional yang kembali disalurkan ke perahu *jolor* untuk membeli kopi, gula, teh, dan beras; jika tidak ada upaya untuk membenahi aspek-aspek detail ini, maka eksekusi dari pembangunan industri sago bisa jadi malah berjalan ke arah pengasingan orang Kais dari sago itu sendiri, menjauhi tanaman yang telah menghidupi mereka dari generasi ke generasi.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian berjudul *Developing Food Security and Green Economy with Sago on Peatland in West Papua* yang dilaksanakan pada Februari–Juni 2017. Penelitian dilaksanakan dalam rangka program *Community Resiliency and Economic Development* yang didanai oleh New Zealand Aid Programme bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada warga di kampung Kais-Tapuri atas kebaikan dan kerjasamanya; Dr. Laksmi A. Savitri dan Dr. Amien Tohari atas diskusi dan gagasannya dalam membangun kerangka awal tulisan ini; serta Carolina Astri yang telah berkenan membagikan catatan lapangannya dari semester pertama penelitian ini.

Daftar Pustaka

- BACHTIAR, H. 1984. "Sejarah Irian Jaya." Dalam *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*, disunting oleh KOENTJARANINGRAT. Jakarta: Djambatan.
- BERNSTEIN, H. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax (Kanada): Fernwood Publishing.
- BOELAARS, J. 1986. *Manusia Irian (Dahulu, Sekarang, Masa Depan)*. Jakarta: Gramedia.
- BUDIARJO, C. dan LIEM SOEI LIONG. 1988. *West Papua: The Obliteration of a People*. TAPOL, the Indonesia Human Rights Campaign.
- DUTA RIMBA. 2016. "Perhutani Segera Mendulang Pemasukan Dari Pabrik Sagu." Januari–Februari: 59–63.
- EHARA, H., Y. TOYODA, dan D.V. JOHNSON. 2018. *Sago Palm: Multiple Contributions to Food Security and Sustainable Livelihoods*. Singapura: Springer Open.
- FINE, B. dan A. SAAD-FILHO. 2010. *Marx's Capital*. London (Inggris): Pluto Press.
- GREENOMICS INDONESIA. 2014. "'Busy years' Ahead until 2017! Spending US\$12 Million on Clearing Papua's Intact Forest Landscapes." [http://www.greenomics.org/docs/ANJ-clearance-Papua-forest_\(LowRes\).pdf](http://www.greenomics.org/docs/ANJ-clearance-Papua-forest_(LowRes).pdf).
- ITO, T., N.F. RACHMAN, dan L.A.SAVITRI. 2014. "Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia." *The Journal of Peasant Studies* 41 (1): 29–50.
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2015*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- LI, T.M. 2002. "Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi: Analisis Terhadap Transformasi Daerah Pedalaman." Dalam *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, disunting oleh TANIA MURRAY LI, 3–74. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- LOUNELA, A. 2002. "Menegosiasikan Hak-Hak Atas Sumber Daya Alam di Indonesia: Desentralisasi di Wonosobo." Dalam *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Perspektif Kampus dan Kampung*, disunting oleh ANU LOUNELA dan YANDO ZAKARIA. Yogyakarta: Insist Press.
- MUBEKTI. 2003. "Spatial Statistics for Estimaing Sago Stock in West Papua, Indonesia." *Jurnal Teknologi Lingkungan* Juli: 95–100.
- METROTVNEWS.COM. 2015a. "Perhutani Bangun Pabrik Agar Sagu Papua Tak Mati Sia-Sia." 14 Oktober. Diakses pada 9 Februari 2020. Terssip di <https://perhutani.co.id/perhutani-bangun-pabrik-agar-sagu-papua-tak-mati-sia-sia/>.

- _____. 2015b. "Sorong Selatan Buka Peluang Investor Garap Potensi Sagu." 15 Oktober. Diakses pada 9 Februari 2020. Tersip di <https://perhutani.co.id/sorong-selatan-buka-peluang-investor-garap-potensi-sagu/>.
- POTTER, L. 2002. "Kehutanan di Indonesia Pada Masa Kontemporer." Dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, disunting oleh THOMAS J. LINDBALD, 443–463. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Asia Tenggara UGM.
- RESOSUDARMO, B.P. 2005. "Introduction." Dalam *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources*, disunting oleh BUDY P. RESOSUDARMO, 1–12. Singapura: ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore.
- RESOSUDARMO, B. P., J.A. MOLLET, U.R. RAYA, dan H. KAIWAI. 2015. "Development in Papua after special autonomy." Dalam *Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia*, disunting oleh Hall Hill, 433–459. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- SAGRIM, M. 2016. "Impacts of Industry Towards the Structure of Customary Land Tenure on the Natural Sago Forest in Imekko, Sorong Selatan Regency-West Papua." *Agriculture, Forestry and Fisheries* 5 (5): 135–140.
- SAVITRI, L. 2013. *Korporasi dan Politik Perampasan Tanah*. Yogyakarta: Insist Press.
- VISSER, L. 2001. "Remaining Poor on Natural Riches?" *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 2 (2): 68–88.
- WIDJOJO, M. 2013. *Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780–1810*. Depok: Komunitas Bambu.
- WOLF, E. 1982. *Europe and The People Without History*. California (Amerika Serikat): University of California Press.